

Laporan Keuangan

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

Gorontalo

Tahun

2021



AUDITED



**MENJADI PENGELOLA
PERBENDAHARAAN
NEGARA YANG
UNGGUL DI TINGKAT
DUNIA**



INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN

KATA PENGANTAR

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Sebagai UAPPA-W, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W yang didukung Catatan atas Laporan Keuangan yang memadai.

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021 *Audited* merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 *Audited*. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai dan bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada UAPPA-W Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021 *Audited* ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Laporan Keuangan ini telah disajikan dengan basis akrual serta disusun secara elektronik menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul GL dan Pelaporan serta aplikasi e-Rekon&LK sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dengan melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang relevan guna mendukung terwujudnya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Harapan akhir bermuara pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang keuangan negara.

Gorontalo, Mei 2022
a.n Kepala Kantor,
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Wiyoso





DAFTAR ISI

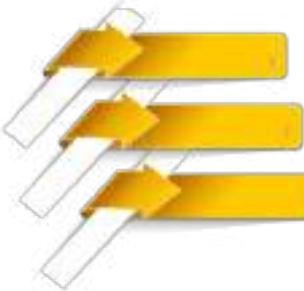
3	KATA PENGANTAR
4	DAFTAR ISI
6	DAFTAR TABEL DAN GRAFIK
8	DAFTAR SINGKATAN
9	DAFTAR ISTILAH
10	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
12	RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
14	DASHBOARD
17	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
21	NERACA
25	LAPORAN OPERASIONAL
29	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

34	A. PENJELASAN UMUM	D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	62
42	B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	68
54	C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	72



LAMPIRAN PENDUKUNG



CETAKAN LAPORAN KEUANGAN SAKTI DAN EREKON LK

BMN

NERACA SUBLEDGER MASING-MASING UAKPA

- BENDAHARA

- ASET TETAP

- PERSEDIAAN



BAR REKONSILIASI

LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

KERTAS KERJA

- BELANJA DIBAYAR DIMUKA
- BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
- PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
- PIUTANG
- MONITORING JURNAL DAN MEMO PENYESUAIAN LAINNYA SERTA DAFTAR REKENING



- KERTAS KERJA TELAAH TINGKAT UAPPAW



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

HALAMAN	
35	TABEL A.1 Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W
37	TABEL A.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih
39	TABEL A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
39	TABEL A.4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Lainnya
42	TABEL B.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2021
43	TABEL B.2 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Per Akun
44	TABEL B.3 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Per Satker
45	TABEL B.1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020
45	TABEL B.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021
46	TABEL B.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020
46	TABEL B.2.3 Rincian Realisasi Belanja Per Satker
47	TABEL B.2.4 Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020
47	TABEL B.3.1 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020
47	TABEL B.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020
48	TABEL B.3.3 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020
48	TABEL B.4.1 Pagu dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020
49	TABEL B.4.2 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020
50	TABEL B.5.1 Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020
50	TABEL B.5.2 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020
51	TABEL B.6.1 Rincian Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021
51	TABEL B.6.2 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 dan 2020
52	TABEL B.6.3 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 dan 2020 Per Akun
54	TABEL C.1.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
54	TABEL C.2.1 Rincian Persediaan Tahun 2021 dan 2020
54	TABEL C.2.2 Rincian Persediaan menurut Satker Tahun 2021
55	TABEL C.3.1 Rincian Mutasi Nilai Tanah Tahun 2021
55	TABEL C.3.2 Rincian Mutasi Nilai Satker Tanah Tahun 2021
55	TABEL C.4.1 Nilai Peralatan dan Mesin Per Satker Tahun 2021
56	TABEL C.4.2 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2021
56	TABEL C.4.3 Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Saldo Awal
56	TABEL C.4.4 Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Pembelian
56	TABEL C.4.5 Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk

57	TABEL C.4.6	Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin dari Penghentian Aset Dari Penggunaan
57	TABEL C.4.7	Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin dari Transfer Keluar Tahun 2021
58	TABEL C.5.1	Nilai Gedung dan Bangunan Per Satker Tahun 2021
58	TABEL C.5.2	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per Satker Tahun 2021
58	TABEL C.6.1	Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Satker Tahun 2021 dan 2020
58	TABEL C.6.2	Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Output Tahun 2021 dan 2020
59	TABEL C.6.3	Rincian Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Satker Tahun 2021 dan 2020
59	TABEL C.7.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021
60	TABEL C.8.1	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN
61	TABEL C.9.1	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortiasi Aset Lainnya Tahun 2021
61	TABEL C.10.1	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2021
62	TABEL D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020
62	TABEL D.2.1	Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020
63	TABEL D.3.1	Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020
63	TABEL D.4.1	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020
64	TABEL D.5.1	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020
64	TABEL D.6.1	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020
65	TABEL D.7.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020
65	TABEL D.9.1	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021
66	TABEL D.12.1	Beban Khusus Pandemi Covid 2020
69	TABEL E.4.1	Transaksi antar Entitas Tahun 2021 dan 2020
69	TABEL E.4.2	Rincian Transaksi Atas Entitas
44	Grafik B.1	Perubahan Pagu Anggaran Awal dan Akhir Tahun 2021
46	Grafik B.2.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Operasional Pada Satker
48	Grafik B.3.3	Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020
51	Grafik B.5.2	Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020
53	Grafik B.6.1	Rincian Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Per Satker Tahun 2021 dan 2020



DAFTAR SINGKATAN

LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
BMN	Barang Milik Negara
BMD	Barang Milik Daerah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
ATB	Aset Tak Berwujud
BLU	Badan Layanan Umum
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
GFS	<i>Government Finance Statistic</i>
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKTI	Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi
SIMAK-BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
UAPPA-W	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UP	Uang Persediaan
TUP	Tambahan Uang Persediaan
GUP	Ganti Uang Persediaan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
DDEL	Diterima Dari Entitas Lain
DKEL	Ditagihkan Ke Entitas Lain
DITJEN	Direktorat Jenderal
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KANWIL	Kantor Wilayah
SATKER	Satuan Kerja
TPA	Tagihan Penjualan Angsuran
RUTR	Rencana Umum Tata Ruang
TA	Tahun Anggaran
IKU	Indikator Kinerja Utama
SARPRAS	Sarana dan Prasarana
MPN G2	Modul Penerimaan Negara Generasi 2
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
TSA	<i>Treasury Single Account</i>
KL	Kementerian Lembaga
BUN	Bendahara Umum Negara
BA-BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara



DAFTAR ISTILAH

UAKPA	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
UAPPA-W	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
UAPPA-E1	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E I adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
Laporan Keuangan	Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
LRA	Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
LO	Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca	Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
CALK	Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Ekuitas	Hak Pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban) , ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba ditahan.
Surplus	Kondisi dimana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran.
Defisit	Kondisi dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.
Satuan Kerja	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
Sakti	Aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran Negara pada tingkat instansi yang meliputi modul penganggaran, modul bendahara, modul persediaan, modul asset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
DIPA	Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).
Akun dalam Akuntansi	Alat pengikhtisaran yang paling dasar dalam akuntansi. Alat ini adalah suatu catatan rinci dari semua perubahan yang terjadi di dalam asset, liabilities atau owners equity selama satu periode waktu tertentu.
Pagu	Batas tertinggi anggaran
Revaluasi Asset	Penilaian kembali asset sesuai kebutuhan dengan tujuan nilai asset menunjukkan nilai yang sebenarnya.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021 *Audited* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, Mei 2022
a.n Kepala Kantor,
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Wiyoso





RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, realisasi Pendapatan Negara adalah Rp24.491.971,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp0, sedangkan realisasi Belanja Negara adalah Rp7.267.707.847,- atau mencapai 99.16% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.329.483.000,-.

2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp66.105.737.000,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp261.876.978,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp65.843.860.022,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp53.284.460,- dan Rp66.052.452.540,- sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp66.105.737.000,-

3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp600.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.210.079.512,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp7.209.479.512).

Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp22.169.996,- terdiri dari Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar adalah Rp12.919.996- terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp12.955.496,- dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp35.500,- sedangkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp9.250.000,- terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp9.250.000,- dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,- .

4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp65.850.492.008,-. Pada Tahun 2021, nilai Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp7.187.309.516). Selanjutnya tidak terdapat terdapat koreksi yang menambah/mengurangi aset sebesar Rp0,-. Selanjutnya transaksi antar entitas selama Tahun 2021 *Audited* adalah sebesar Rp7.439.515.929. Dengan demikian, nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas adalah sebesar Rp201.960.532. Dengan adanya kenaikan ekuitas tersebut maka Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.052.452.540.

5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

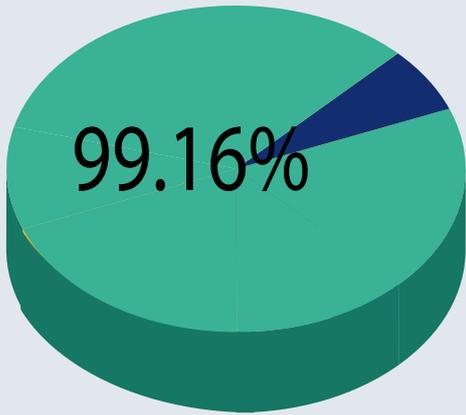
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Laporan Keuangan ini, Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021. disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 *Audited* disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual. Dalam Laporan Keuangan ini juga memuat informasi penting terkait anggaran dan belanja dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19*.

DASHBOARD LAPORAN KEUANGAN

REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN

REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

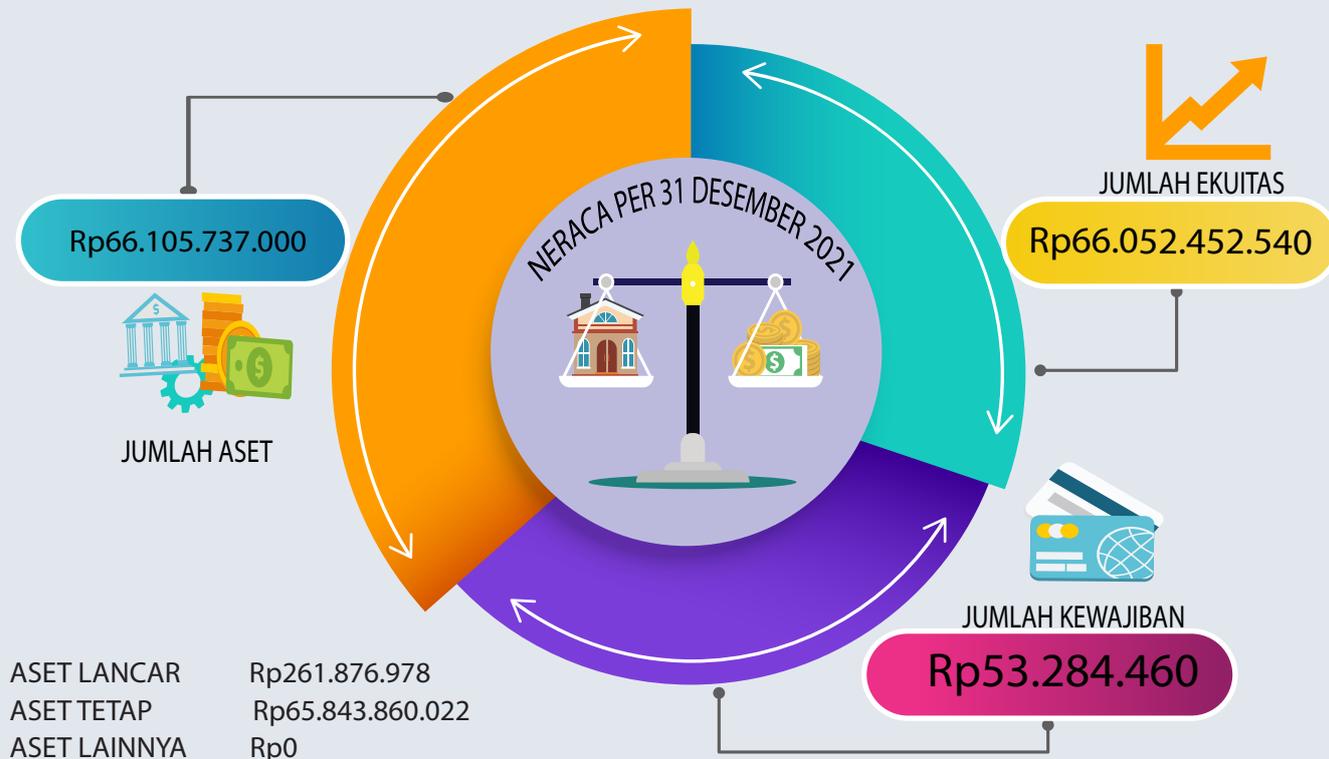


%Realisasi
Jenis Belanja

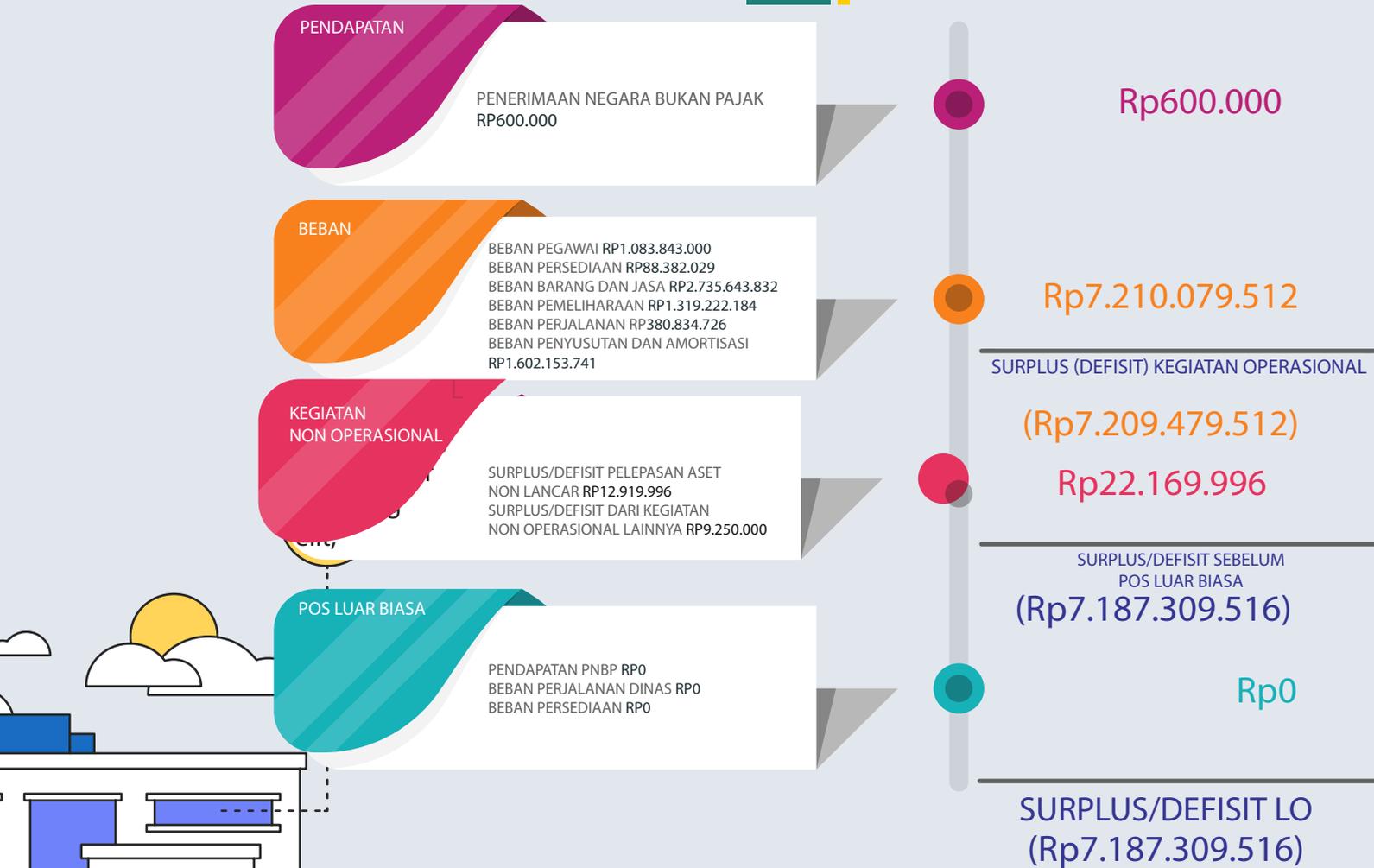
Realisasi
Pagu



NERACA



LAPORAN OPERASIONAL



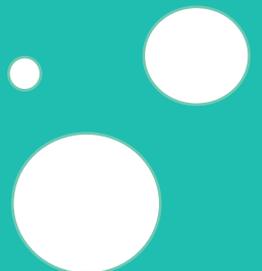
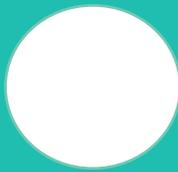
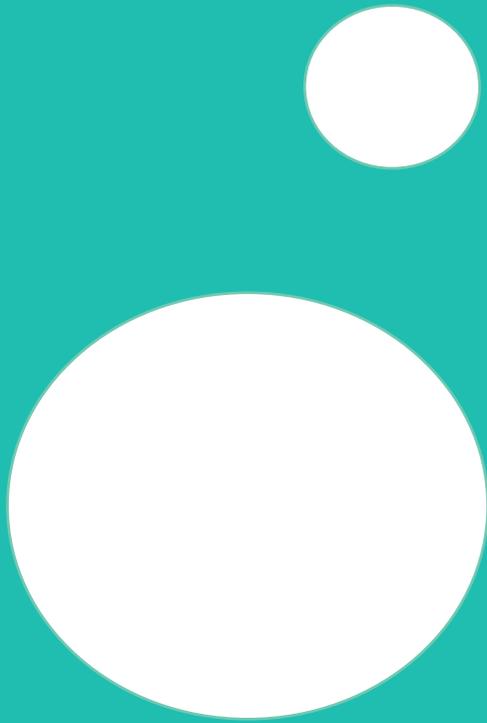
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS







LAPORAN REALISASI ANGGARAN



1 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	24.491.971	0	29.760.000
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0	0
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	1.086.384.000	1.083.843.000	100	1.003.700.000
Belanja Barang	B.3	4.600.078.000	4.546.112.317	99	4.949.000.695
Belanja Modal	B.4	1.643.021.000	1.637.752.530	100	1.094.661.385
JUMLAH BELANJA		7.329.483.000	7.267.707.847	100	7.047.362.080



Festival Karawo adalah salah satu festival yang bertujuan untuk mempopulerkan kain tradisional Gorontalo yaitu Karawo. Festival yang digelar setiap tahun di Kota Gorontalo ini pertama kali digelar pada 17 s.d 18 Desember 2011. Festival Karawo biasanya dimeriahkan dengan pameran kerajinan karawo, parade dan peragaan busana karawo yang diikuti Pemerintah Daerah, perbankan dan pelaku usaha. Festival ini juga melibatkan ratusan hingga ribuan orang baik dari kalangan pelajar, pemerintah setempat, dan masyarakat umum.



NERACA

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Persediaan	C.2	261.876.978	236.808.853
Jumlah Aset Lancar		261.876.978	236.808.853
ASET TETAP			
Tanah	C.3	43.255.151.000	43.169.726.000
Peralatan dan Mesin	C.4	14.231.889.636	15.068.105.226
Gedung dan Bangunan	C.5	23.054.605.235	22.034.860.235
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	196.299.500	196.299.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.7	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(14.894.085.349)	(14.855.307.806)
Jumlah Aset Tetap	C.	65.843.860.022	65.613.683.155
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	0	61.204.200
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	0	(61.204.200)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		66.105.737.000	65.850.492.008
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	53.284.460	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.12	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.13	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.	53.284.460	0
JUMLAH KEWAJIBAN		53.284.460	0
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.14	66.052.452.540	65.850.492.008
JUMLAH EKUITAS DANA		66.052.452.540	65.850.492.008
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		66.105.737.000	65.850.492.008





LAPORAN OPERASIONAL

3 LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	600.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,083,843,000	1,003,700,000
Beban Persediaan	D.3	88,382,029	108,625,647
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,735,643.832	2,894,784,426
Beban Pemeliharaan	D.5	1,319,222,184	1,496,811,851
Beban Perjalanan Dinas	D.6	380,834,726	503,330,176
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1,602,153,741	1,518,794,346
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.	-	-
JUMLAH BEBAN		7,210.079.512	7,526,046,446
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.8	(7,209,479,512)	(7,526,046,446)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			-
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		12,919,996	24,124,000
Surplus/(defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		9,250,000	(1,428,321)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	22,169,996	22,695,679
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(7,187,309,516)	(7,503,350,767)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPNP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	D.10	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(7,187,309,516)	(7,503,350,767)



MENARA KEAGUNGAN LIMBOTO

Menara Keagungan Limboto berlokasi di Kecamatan Limboto, ibukota Kabupaten Gorontalo. Menara yang didesain mirip dengan Menara Eiffel di Paris Prancis ini dibangun pada tahun 2001 pada masa pemerintahan Bupati Kabupaten Gorontalo, Ahmad Pakaya. Menara ini dibangun setinggi 65 meter dan lebar 21 Meter, serta terdapat 5 lantai, dilantai ke-5 itulah, pengunjung dapat menikmati pemandangan Kabupaten Gorontalo dari ketinggian.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	65,850,492,008	65,753,478,352
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7.187.309.516)	(7,503,350,767)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(50.245.881)	9,406,373
Penyesuaian Nilai Aset	E.	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.2	-	6,178,000
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	-	3,228,373
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7,439,515,929	7,590,958,050
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		201.960.532	97,013,656
EKUITAS AKHIR	E.5	66,052,452,540	65,850,492,008



PULAU SARONDE

Pulau Saronde yang menjadi bagian Provinsi Gorontalo merupakan pulau kecil tak berpenghuni yang mengandalkan potensi pesona alam dan budaya. Pulau cantik yang terletak di utara Teluk Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ini mulai dikenal luas karena mampu memikat hati para turis domestik maupun mancanegara. Perairan di sekitar Pulau Saronde dikenal bersih dan tidak tercemar oleh sampah-sampah industri, sehingga sangat layak untuk berbagai kegiatan air seperti berenang, berselancar, menyelam, snorkeling, dan ski air.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A | **PENJELASAN UMUM***Dasar Hukum
Entitas dan Rencana
Strategis***A.1** | **PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH DITJEN
PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo didirikan sebagai konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berkedudukan di Jalan Achmad Najamuddin No. 3, Kota Tengah Gorontalo. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, diharapkan kualitas laporan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berkomitmen dengan visi "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia". Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal.
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

A.2 | **PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN***Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Sejak tahun 2017, Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dilingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu sarana yang dibangun bagi satker dan terdiri dari beberapa gabungan aplikasi guna mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan proses pengelolaan keuangan mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Hal ini dilakukan mengingat sebelumnya dalam proses perencanaan anggaran hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pada tingkat satker menggunakan aplikasi yang terpisah, sehingga dengan adanya aplikasi SAKTI, diharapkan rangkaian proses perencanaan sampai pelaporan dapat lebih cepat dan terstruktur.

SAKTI terdiri dari beberapa modul yaitu penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, pelaporan (GLP), dan administrator. Khusus dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SAKTI, laporan keuangan yang dihasilkan sebelumnya oleh Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dapat dihasilkan melalui aplikasi SAKTI modul pelaporan (GLP) sedangkan laporan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya, dapat dihasilkan melalui modul Aset Tetap dan modul Persediaan pada Aplikasi SAKTI.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 *Audited* ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah 3 satuan kerja (satker). Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Tabel A.1. Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wilayah	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	026	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo	-	1	-	-	1
2	026	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo	-	1	-	-	1
3	026	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Marisa	-	1	-	-	1
Jumlah			-	3	-	-	3

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 *Audited* ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Akuntansi

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Dasar Pengukuran

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Pendapatan - LRA

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan - LO

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Beban

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset Lancar

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

*Penyusutan Aset
Tetap*

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan hak yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Lainnya

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 Tahun
<i>Franchise</i>	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun

Kewajiban

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Pengungkapan Akun Penanganan Pandemi COVID-19

Penyusunan LKKL secara umum mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016. Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LKKL tersebut disusun secara sistematis, sesuai pedoman penyusunan LKKL. Meskipun tidak diatur secara khusus, pengungkapan atas transaksi yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 dapat mengikuti ilustrasi CaLK sebagaimana dituangkan dalam lampiran PMK Nomor 222/PMK.05/2016. Selain itu, **Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Audited)**. Surat tersebut mengatur agar dalam CaLK LKKL/LKBUN Tahun 2021 (Audited) ditambahkan penjelasan dampak penanganan pandemi COVID-19 terhadap LKKL/LKBUN, antara lain mengenai dampak terhadap anggaran dan realisasinya termasuk penerimaan hibah langsung, pekerjaan fisik yang terhambat sehingga berpotensi meningkatkan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), kerugian mitra yang berpotensi meningkatkan piutang tak tertagih, potensi turunnya penerimaan perpajakan dan PNPB, dan lain sebagainya. Pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, dan beban terkait penanganan pandemi COVID-19 perlu diungkapkan secara khusus dalam CaLK untuk memberikan informasi yang lebih detail bagi pengguna laporan keuangan. Dalam hal terdapat informasi lain yang relevan, perlu ditambahkan penjelasan atas hal-hal penting tersebut pada setiap pos laporan keuangan. Selain itu, apabila terdapat informasi penting lainnya terkait penanganan pandemi COVID-19 namun tidak secara spesifik mempengaruhi pos laporan keuangan, agar diungkapkan pada penjelasan penting lainnya.

Pengungkapan

Akun

Penanganan

Pandemi COVID-19

- Halaman ini sengaja dikosongkan -



PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, satker di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal TA 2021 yang meliputi revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi. Anggaran sebelum dan setelah revisi untuk pendapatan dan belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel B.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2021

URAIAN	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Pengurangan/Penambahan
Pendapatan Negara			
Pendapatan Pajak	-	-	-
Pendapatan Bukan Pajak	-	-	-
Total Pendapatan	-	-	-
Belanja			
Belanja Pegawai	1.113.588.000	1.086.384.000	(27.204.000)
Belanja Barang	6.066.819.000	4.600.078.000	(1.466.741.000)
Belanja Modal	1.110.523.000	1.643.021.000	532.498.000
Total Belanja	8.290.930.000	7.329.483.000	(907.039.000)

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

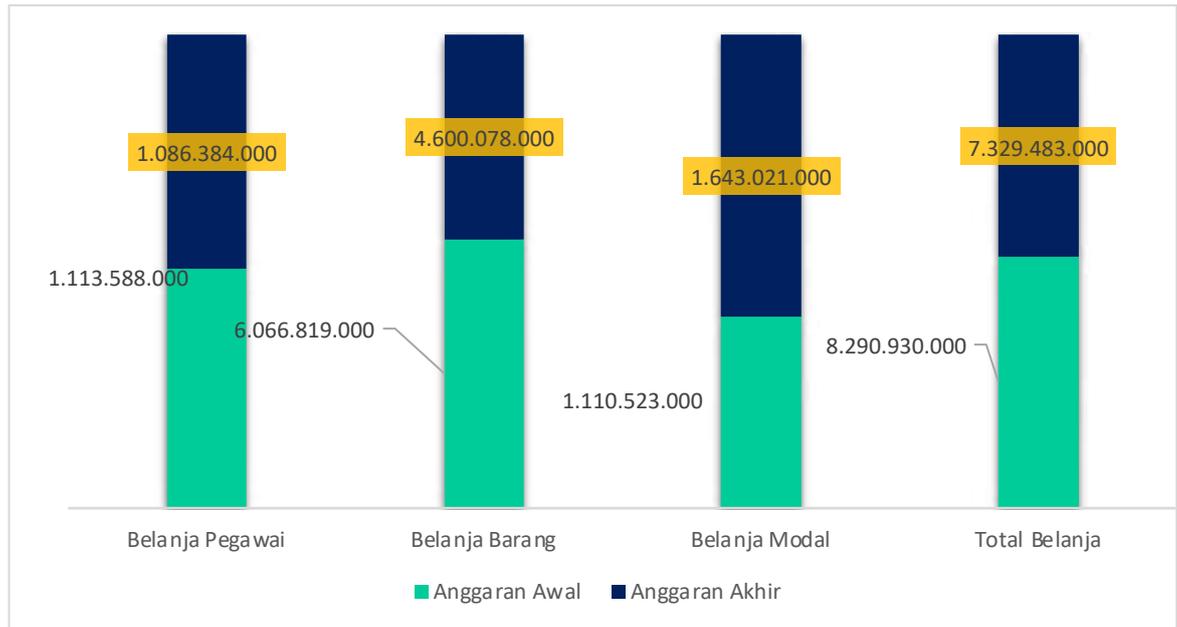
1. Terdapat estimasi anggaran pendapatan, pada DIPA akhir sebesar Rp0.
2. Selama Tahun 2021 *Audited*, terdapat pengurangan pagu belanja sebesar (Rp907.039.000), yaitu dari pagu awal sebesar Rp8.290.930.000 menjadi Rp7.329.483.000. Pengurangan pagu terjadi pada akun belanja Barang sebesar (Rp1.466.741.000) dan Penambahan pagu terjadi pada akun belanja modal sebesar Rp532.498.000. Pengurangan pagu belanja barang diakibatkan oleh adanya penghematan belanja pada satker lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-26/PB/2020 tanggal 20 Januari 2021 dalam Rangka Penghematan Belanja pada Satker-satker Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2021. Pada Tahun 2021 di Semester I terdapat Penambahan pagu belanja modal dalam rencana implementasi *Activity Based Workplace* (ABW) pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
3. Pemutakhiran pedoman operasional kerja (POK) dengan menambahkan akun-akun baru terkait penanganan pandemi covid 19, yaitu akun 521131 (Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19), 522192 (Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19), 521841 (Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19).

Rincian perubahan anggaran belanja per kode akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.2 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Per Akun

Akun	Keterangan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Penambahan/ Pengurangan
511129	Belanja Uang Makan PNS	720.708.000	651.077.000	(69.631.000)
512211	Belanja Uang Lembur	392.880.000	435.307.000	(42.427.000)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.268.110.000	1.188.005.000	(80.105.000)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	40.240.000	18.193.000	(22.047.000)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	386.520.000	371.992.000	(14.528.000)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	284.084.000	223.763.000	(60.321.000)
521131	Belanja Barang Operasional- Pandemi	0	53.538.000	53.538.000
521211	Belanja Bahan	596.448.000	108.292.000	(488.156.000)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	40.130.000	36.581.000	(3.549.000)
521811	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	144.348.000	72.582.000	(71.766.000)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	152.000.000	154.168.000	2.168.000
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid	30.000.000	12.176.000	(17.824.000)
522111	Belanja Langganan Listrik	517.020.000	478.534.000	(38.486.000)
522112	Belanja Langganan Telepon	78.000.000	94.631.000	(16.631.000)
522113	Belanja Langganan Air	40.000.000	30.489.000	(9.511.000)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10.680.000	21.341.000	10.661.000
522141	Belanja Sewa	5.000.000	4.400.000	(600.000)
522151	Belanja Jasa Profesi	30.200.000	39.907.000	9.707.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	17.275.000	17.275.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	613.622.000	626.123.000	12.501.000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	78.519.000	59.249.000	(19.270.000)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	897.100.000	595.361.000	(301.739.000)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	428.816.000	238.820.000	(189.996.000)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.020.000	85.902.000	36.882.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	202.644.000	55.390.000	(147.254.000)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	174.318.000	13.366.000	(160.952.000)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.409.000	537.850.000	366.441.000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000	550.000.000	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	389.114.000	555.171.000	166.057.000
	Jumlah Total	8.290.930.000	7.329.483.000	(961.447.000)

Grafik B.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2021 Audited



Tabel B.3 Rincian Anggaran Perubahan per Satker Tahun 2021 Audited

Nama Satker	Jenis Belanja	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Penambahan (Pengurangan)
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Belanja Pegawai	534.576.000	521.088.000	(13.488.000)
	Belanja Barang	2.847.166.000	2.109.398.000	(737.768.000)
	Belanja Modal	947.952.000	1.483.794.000	535.842.000
	Total Belanja	4.329.694.000	4.114.280.000	(215.414.000)
KPPN Gorontalo	Belanja Pegawai	369.600.000	369.600.000	0
	Belanja Barang	1.907.090.000	1.464.365.000	(442.725.000)
	Belanja Modal	36.000.000	36.000.000	0
	Total Belanja	2.312.690.000	1.869.965.000	(442.725.000)
KPPN Marisa	Belanja Pegawai	209.412.000	195.696.000	(13.716.000)
	Belanja Barang	1.312.563.000	1.026.315.000	(286.248.000)
	Belanja Modal	126.571.000	123.227.000	(3.344.000)
	Total Belanja	1.648.546.000	1.345.238.000	(303.308.000)
Total Seluruh Satker lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	Belanja Pegawai	1.113.588.000	1.086.384.000	(27.204.000)
	Belanja Barang	6.066.819.000	4.600.078.000	(1.466.741.000)
	Belanja Modal	1.110.523.000	1.643.021.000	532.498.000
	Total Belanja	8.290.930.000	7.329.483.000	(961.447.000)

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 adalah Rp24.491.971 dari estimasi sebesar Rp0. Rincian pendapatan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Realisasi
Pendapatan
Rp24.491.971,-

Tabel B.1.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020 Audited

URAIAN		TA 2021	TA 2020	Naik / (Turun)	Naik / (Turun) %
Pendapatan PNBP					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.799.497	28.495.000	-15.695.503	(82%)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	155.999	1.265.000	-1.109.001	(14%)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	600.000	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP		13.555.496	29.760.000	-16.204.504	(84%)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	9.250.000	-	-	-
Jumlah Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan		9.250.000	0	9.250.000	0%
Pendapatan Lain-Lain					
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.686.475	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		1.686.475	0	0	0
Total Pendapatan		24.491.971	29.760.000	-5.268.029	(17,70%)

Pada tahun 2021 terdapat realisasi pendapatan pada UAPPA-W Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berupa :

- Pendapatan dari penjualan dengan cara Lelang peralatan dan mesin (akun 425122) senilai Rp12.799.497, yaitu terdiri dari Hasil Lelang PC Unit, CPU, dll dan Kondisi Rusak Berat senilai Rp4.578.909 pada Kanwil DJPb Gorontalo. 6 buah lemari, 1 rak kayu, 4 note book, 3 buah printer. senilai Rp2.065.000 pada KPPN Gorontalo. Kursi, Meja Kayu, PC Unit, LCD Proyektor dalam kondisi rusak berat senilai Rp6.155.588 pada KPPN Marisa.

-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (akun 425129) senilai Rp155.999 yaitu hasil lelang Paket Bongkaran Kayu rehabilitasi rumah dinas pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

-Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sebesar Rp9.250.000,- pada KPPN Gorontalo, digunakan untuk penyelesaian TGR ikatan dinas pegawai KPPN Gorontalo yang keluar di tahun 2008.

-Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp1.686.475 pada KPPN Gorontalo, digunakan untuk mengganti uang persekot yang sudah terbayar, karena sebelumnya pegawai yang keluar dari KPPN Gorontalo melakukan permintaan persekot ketika pindah ke Gorontalo.

-Pendapatan TA 2021 satker lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengalami penurunan sebesar (17,70%) yaitu turun Rp5.268.029,- terhadap pendapatan TA 2020.

B.2 BELANJA

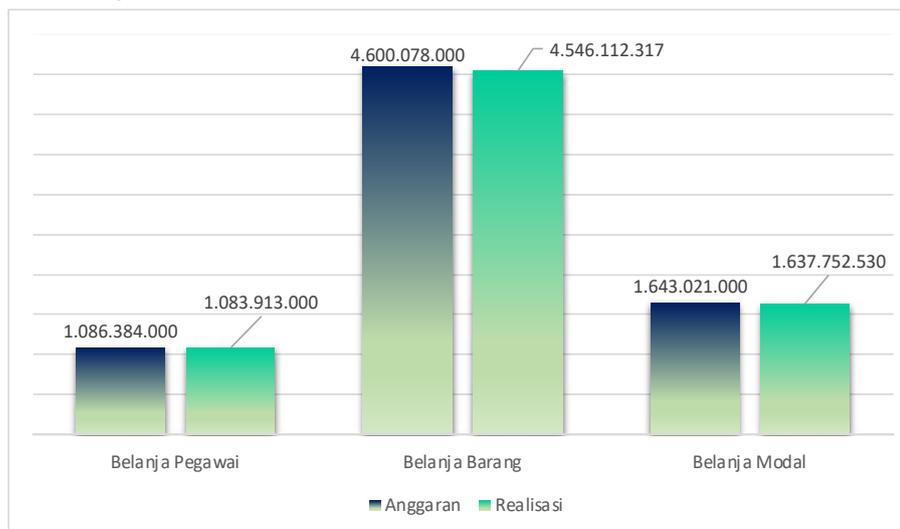
Realisasi Belanja instansi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.267.707.847 atau 99,16 % dari anggaran belanja sebesar Rp7.329.483.000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 Audited

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	1.086.384.000	1.083.913.000	99,77%
Belanja Barang	4.600.078.000	4.546.112.317	98,83%
Belanja Modal	1.643.021.000	1.637.752.530	99,68%
Total Belanja Kotor	7.329.483.000	7.267.777.847	99,16%
Pengembalian Belanja	-	70.000	-
Jumlah	7.329.483.000	7.267.707.847	99,16%

Realisasi
Belanja Negara
Rp7.267.707.847

Grafik B.2.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Pada Satker
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Audited (dalam Rupiah)



Dari tabel di atas, angka penyerapan anggaran cukup wajar untuk realisasi 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 telah dilaksanakan dengan optimal. Sesuai dengan target pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, nilai target penyerapan telah melampaui target tersebut.

Tabel B.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 Audited (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	% Naik/ (Turun)
Belanja Pegawai	1.083.843.000	1.003.700.000	8%
Belanja Barang	4.546.112.317	4.949.000.695	(8%)
Belanja Modal	1.637.752.530	1.094.661.385	50%
Jumlah	7.267.707.847	7.047.362.080	3%

Realisasi belanja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 Audited mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pada belanja modal dan belanja pegawai, terutama karena adanya rehab rumah dinas dan pembelian rumah dinas serta optimalisasi belanja pegawai. Dengan adanya pandemi Covid-19 anggaran belanja barang dilakukan realokasi dan *refocussing*. Pada alokasi belanja modal tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan alokasi belanja modal tahun 2020 dan mendongkrak capaian realisasi lebih banyak dibandingkan Tahun 2020. Rincian belanja per satker Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.3 Rincian Realisasi Belanja Per Satker (dalam rupiah)

URAIAN	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	KPPN Gorontalo	KPPN Marisa	TOTAL
Belanja Pegawai	520.295.000	369.597.000	193.951.000	1.083.843.000
Belanja Barang	2.059.401.159	1.462.681.947	1.024.029.211	4.546.112.317
Belanja Modal	1.478.620.730	35.931.000	123.200.800	1.637.752.530
Jumlah	4.058.316.889	1.868.209.947	1.341.181.011	7.267.707.847

Jika dilihat dari segi komposisi belanja, terdapat perubahan komposisi belanja antara Tahun 2021 dan 2020 Audited yaitu sebagai berikut:

Tabel B.2.4 Komposisi Realisasi Tahun 2021 Audited(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi TA 2021	% Terhadap Total Realisasi	Realisasi TA 2020	% Terhadap Total Realisasi
Belanja Pegawai	1.083.843.000	14,91%	1.003.700.000	14%
Belanja Barang	4.546.112.317	62,55%	4.949.000.695	70%
Belanja Modal	1.637.752.530	22,53%	1.094.661.385	16%
Jumlah	7.267.707.847	100%	7.047.362.080	100%

Pada tabel di atas, komposisi belanja terbanyak untuk Tahun 2021 *Audited* adalah Belanja Barang sebesar 62,55%, belanja modal sebesar 22,53% dan Belanja Pegawai sebesar 14,91%. Pada tahun sebelumnya, komposisinya berbeda, yaitu Belanja Barang sebesar 70%, diikuti oleh Belanja Pegawai sebesar 14%, kemudian Belanja Modal sebesar 16%. Dari perbandingan komposisi belanja, Belanja Barang mendapatkan porsi terbanyak setiap tahun karena berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi satker lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Untuk komposisi belanja modal lebih banyak dari tahun sebelumnya karena ada proyek rehabilitasi/renovasi dan pembelian Rumah Dinas pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Belanja Modal tergantung apakah pada tahun tersebut terdapat alokasi dana yang besar untuk belanja modal atau tidak. Untuk belanja pegawai, jumlah rupiahnya relatif tidak banyak berubah karena hanya terdiri dari belanja uang makan dan uang lembur.

B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp1.083.843.000 dan Rp1.003.700.000. Realisasi Belanja tahun 2021 *Audited* adalah sebesar Rp1.083.843.000 dari pagu anggaran sebesar Rp1.086.384.000 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Uang Makan PNS dan Belanja Uang Lembur.

Realisasi
Belanja Pegawai
Rp1.083.843.000

Tabel B.3.1 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 Audited (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
2021	1.086.384.000	1.083.843.000	99,77%
2020	1.009.552.000	1.003.700.000	99,42%

Perbandingan Anggaran dan Realisasi belanja pegawai Tahun 2021 *Audited* adalah sebagai berikut:

Tabel B.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 Audited (dalam rupiah)

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Uang Makan	651.077.000	648.934.000	99,67%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	435.307.000	434.909.000	99,91%
Belanja Vakansi	-	-	-
Total Belanja Kotor	1.086.384.000	1.083.843.000	99,77%
Jumlah	1.086.384.000	1.083.843.000	99,77%

Komponen belanja pegawai yang terdapat pada satker vertikal DJPb adalah (1) belanja gaji dan tunjangan PNS berupa belanja uang makan dan (2) belanja uang lembur. Dari kedua tabel di atas, Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai pada tahun 2021 naik jika dibandingkan tahun 2020, yaitu menjadi 99,77% dibandingkan 99,42%.

Demikian, secara jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan belanja pegawai disebabkan adanya kenaikan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan di luar jam kerja (lembur) selama masa pandemi Covid-19 karena sistem kerja *New Normal* serta ada kenaikan jumlah pegawai menjadi 42 semula 38 pegawai per September 2021.

Tabel B.3.3 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
- 511129 Belanja Uang Makan PNS	649.004.000	623.823.000	4,04%
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	649.004.000	623.823.000	4,04%
5122 Belanja Lembur			
- 512211 Belanja Uang Lembur	434.909.000	379.877.000	14,49%
Jumlah Belanja Lembur	434.909.000	379.877.000	14,49%
Jumlah Belanja Kotor	1.083.913.000	1.003.700.000	7,99%
Pengembalian Belanja	70.000		
Jumlah Belanja	1.083.843.000	1.003.700.000	7,98%

Dari kedua tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kenaikan tingkat penyerapan anggaran menunjukkan adanya peningkatan ketepatan dalam perencanaan anggaran berkenaan dengan belanja pegawai.
- Secara rupiah, realisasi belanja pegawai Tahun 2021 mengalami kenaikan 7,98% dibandingkan realisasi tahun 2020, yaitu belanja uang makan naik sebesar 4,04% serta belanja uang lembur naik sebesar 14,49%. Kenaikan belanja uang makan disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah dan komposisi pegawai tahun 2021 dan 2020 sehingga belanja uang makan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja uang lembur mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan kenaikan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan di luar jam kerja (lembur) selama masa pandemi Covid-19 karena sistem kerja *New Normal* pada tahun 2021.
- Pada Tahun 2021 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp70.000,- karena kelebihan pembayaran uang makan di KPPN Marisa.

Grafik B.3.3 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)



B.4 BELANJA BARANG

Realisasi

Belanja Barang
Rp4.546.112.317

Realisasi Belanja Barang tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.546.112.317 dan Rp4.949.000.695. Secara Presentase realisasi belanja barang Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 98,83% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 98,18%. Perbandingan pagu dan realisasi belanja barang Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.1 Pagu dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
2021	4.600.078.000	4.546.112.317	98,83%
2020	5.040.989.000	4.949.000.695	98,18%

Perbandingan realisasi belanja barang secara terperinci tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel B.4.2 Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	% Naik/ (Turun)
5211 Belanja Barang Operasional	1.845.113.540	1.929.541.766	-4,38%
5212 Belanja Barang Non Operasional	210.791.437	319.257.949	-33,97%
5218 Belanja Persediaan	165.354.324	132.136.226	25,14%
5221 Belanja Jasa	676.700.276	645.984.711	4,75%
5231 Belanja Pemeliharaan	1.267.318.014	1.418.749.867	-10,67%
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	380.834.726	503.330.176	-24,34%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	4.546.112.317	4.949.000.695	-8,14%
Pengembalian Belanja	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	4.546.112.317	4.949.000.695	-8,14%

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, karena adanya penghematan anggaran belanja karena pandemi Covid-19. Dari jumlah realisasi keseluruhan, realisasi tahun 2021 adalah Rp4.546.112.317 turun sebesar (8,14%) dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.949.000.695. Dari persentase realisasi terhadap anggaran, terdapat kenaikan persentase realisasi dari 98,18% menjadi 98,83%. Dari angka pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan realisasi belanja barang operasional sebesar (4,38%) dari tahun sebelumnya yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satker di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.
2. Terdapat penurunan realisasi belanja barang non operasional sebesar (33,97%) dari tahun sebelumnya karena terdapat pemotongan anggaran dalam rangka *refocussing* anggaran belanja K/L.
3. Terdapat kenaikan realisasi belanja persediaan sebesar 25,14% yang menunjukkan kenaikan kebutuhan barang persediaan karena adanya pelaksanaan *New Normal Work From Office 50%* jumlah Pegawai Kantor.
4. Terdapat kenaikan belanja jasa sebesar 4,75% dari belanja tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya kenaikan terhadap penggunaan daya dan jasa karena adanya pelaksanaan *New Normal Work From Office 50%* jumlah Pegawai Kantor.
5. Terdapat penurunan belanja pemeliharaan sebesar (10,67%) karena terdapat pemotongan anggaran dalam rangka *refocussing* anggaran belanja K/L.
6. Terdapat penurunan terhadap belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar (8,14%) yang disebabkan karena terdapat pemotongan anggaran dalam rangka *refocussing* anggaran belanja K/L.
7. Pemotongan anggaran dalam rangka *refocussing* anggaran belanja K/L, dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran belanja untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.



B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal
Rp1.637.752.530

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.637.752.530 dan Rp1.094.661.385 Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel B.5.1 Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
2021	1.643.021.000	1.637.752.530	99,68%
2020	1.112.949.000	1.094.661.385	98,36%

Persentase penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2021 naik dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini karena terdapat penambahan dalam belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2021 dan penambahan belanja penambahan nilai gedung bangunan Kanwil DJPb Gorontalo (ABW) sedangkan pada tahun 2020 terdapat efisiensi dalam penyerapan belanja modal Rehab Rumah Dinas pada Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo (output tercapai dengan belanja yang lebih hemat). Perbandingan pagu dan realisasi belanja modal secara terperinci Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel B.5.2 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

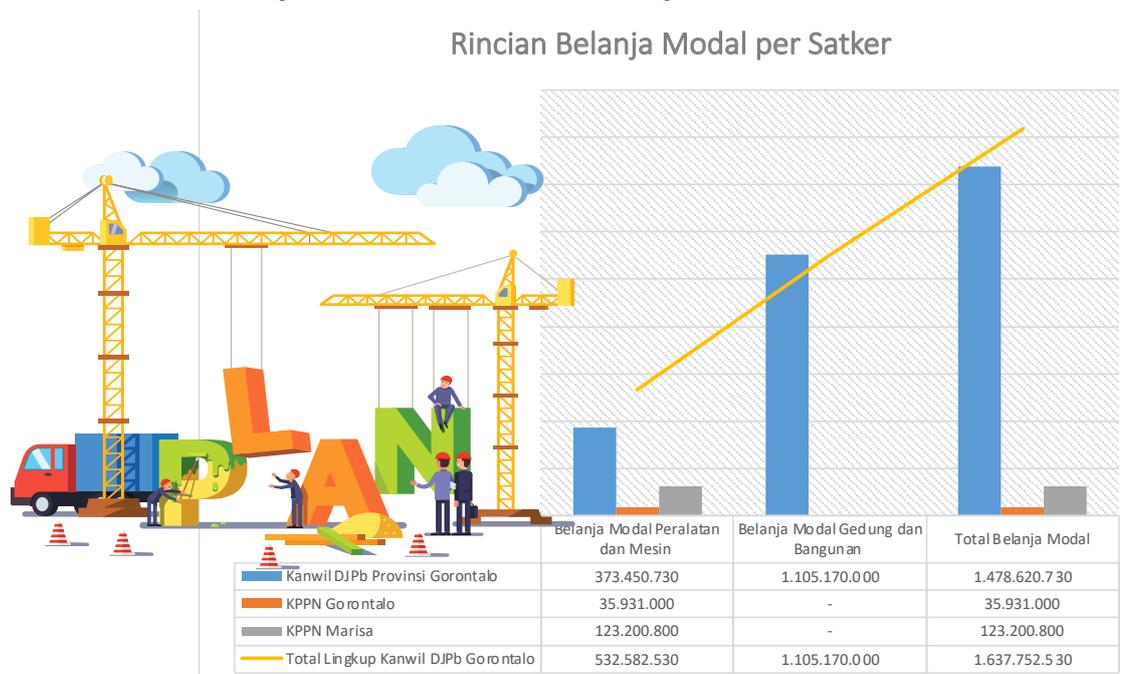
URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532.582.530	542.403.000	-1,81%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.105.170.000	552.258.385	100,12%
Jumlah Belanja Kotor	1.637.752.530	1.094.661.385	49,61%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.637.752.530	1.094.661.385	49,61%

Persentase penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2021 sebesar 99,68% dari pagu anggaran sebesar Rp1.643.021.000 naik jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 98,36%. Secara jumlah realisasi belanja modal Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 49,61% dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari Rp1.094.661.385 menjadi Rp1.637.752.530. Kenaikan ini disebabkan alokasi belanja modal dalam DIPA yang mengalami kenaikan. Angka pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp532.582.530 dan Rp542.403.000. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (1,81%) bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Ini dikarenakan pada tahun ini Alokasi pengadaan kendaraan dinas mobil tidak ada.
- Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan signifikan sebesar 100,12% kenaikan ini disebabkan adanya alokasi belanja modal yang besar sebagaimana dilakukan di tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 digunakan untuk pembelian Rumah hasil Pengadaan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen seharga Rp550.000.000 serta Belanja Modal Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa renovasi rumah dinas serta renovasi gedung kantor Kanwil DJPb Gorontalo (ABW) sebesar Rp555.171.000.

Setelah ini terdapat grafik yang menunjukkan bahwa khusus untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya terdapat pada Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, yaitu berupa pekerjaan Rehabilitas dan Pembelian Rumah Dinas.

Grafik B.5.2 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2021



B.6 | PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pada Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengalokasikan sejumlah belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp82.989.000, yang terdiri dari belanja barang. Dari jumlah tersebut, dan anggaran tersebut terserap sejumlah Rp82.452.922 atau terserap 99,35% dari nilai anggaran.

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Rp82.452.922

Tabel B.6.1 Rincian Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2021

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53.538.000	53.419.107	99,78%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-20	12.176.000	12.058.815	99,04%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.275.000	16.975.000	98,26%
Belanja 52	Jumlah	82.989.000	82.452.922	99,35%
Belanja 53	Jumlah	0	0	0,00%

Realisasi Belanja Barang penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp82.452.922 dan Rp226.724.560. Penyerapan belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 99,35% dari penyerapan tahun sebelumnya 92,71%. Perbandingan pagu dan realisasi belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel B.6.2 Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
2021	82.989.000	82.452.922	99,35%
2020	244.550.000	226.724.560	92,71%

Penanganan pandemi Covid-19 dilakukan untuk melakukan rapid Antigen test kepada pegawai oleh pihak ketiga, pembelian masker, hand sanitizer, sarung tangan, pembelian bahan-bahan.

Seluruh belanja sampai dengan Tahun 2021 untuk keperluan belanja Covid-19 telah menggunakan akun Covid-19.

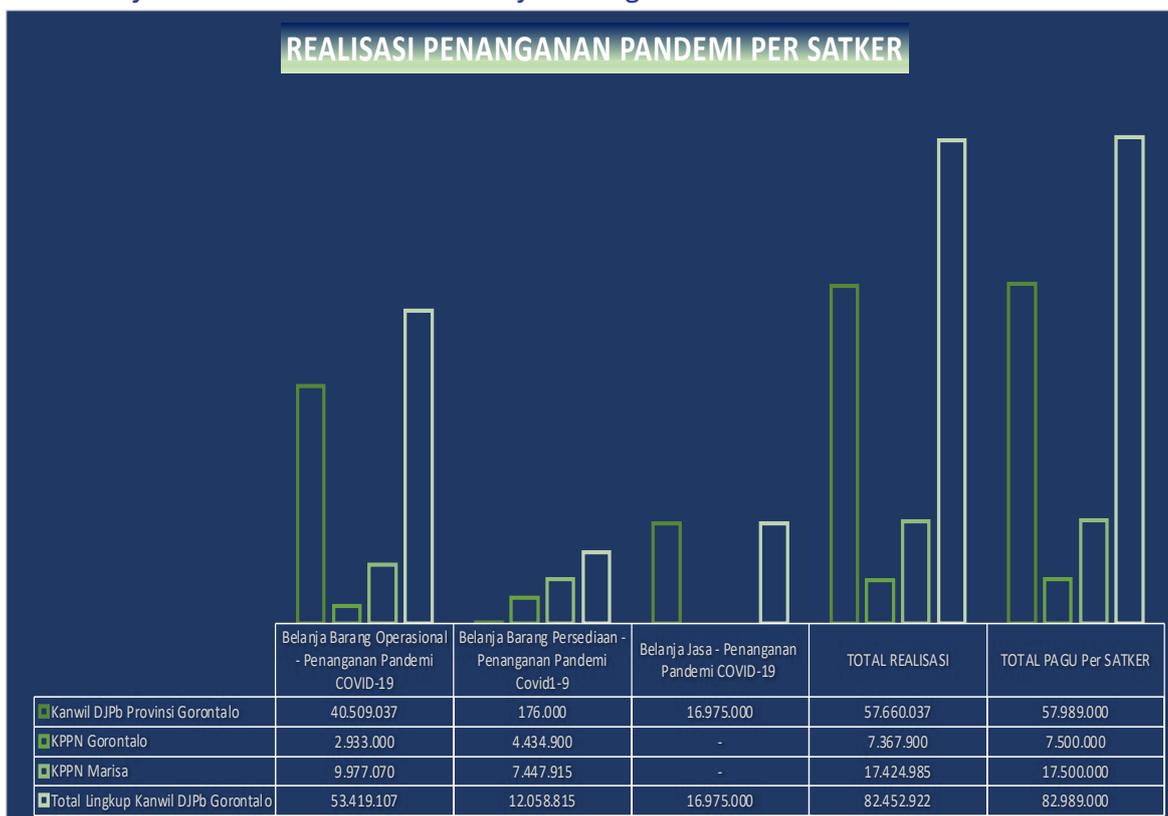
Perbandingan pagu dan realisasi akun belanja secara terperinci Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel B.6.3 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 dan 2020 Per Akun

Akun	Uraian	2021		2020		NAIK (TURUN) %
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53.538.000	53.419.107	91.929.000	90.316.231	(41%)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0	0	0%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	62.645.000	46.433.969	(100%)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	12.176.000	12.058.815	3.750.000	3.750.000	222%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.275.000	16.975.000	35.585.000	35.585.000	(52%)
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	27.779.000	27.777.360	-(00%)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	0	0%
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	19.650.000	19.650.000	(100%)
Belanja 52	Jumlah	82.989.000	82.452.922	241.338.000	223.512.560	(63%)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	3.212.000	3.212.000	(00%)
Belanja 53	Jumlah	0	0	0	0	0%
Total		82.989.000	82.452.922	244.550.000	226.724.560	(64%)

Dari presentase realisasi Tahun 2021 terhadap realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu (64%). Angka tersebut terbentuk karena ada beberapa akun anggaran yang tidak dimunculkan seperti Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesi Penanganan Pandemi Covid-19, dan Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 terdapat kenaikan yang signifikan belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar 222%.

Grafik B.6.1 Rincian Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Per Satker Tahun 2021



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa Realiasi terbesar secara keseluruhan selama Tahun 2021 dari Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar Rp57.660.037,-. Untuk realisasi terbesar pada Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebesar Rp40.509.037, Realisasi terbesar pada Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid1-9 adalah KPPN Marisa sebesar Rp7.447.915,- Barang persediaan Penanganan Covid-19 dalam bentuk Masker Bedah,Alat Rapid Covid-19, Hand Sanitizer, Masker, Hand Soap, CDR (Calcium Redoxon), Imboost Force, Masker Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu Kanwil DJPb Gorontalo sebesar Rp16.975.000,- untuk pengadaan Pelaksanaan Rapid Test Antigen Swab PCR Covid-19 (Rapid Rutin Kanwil dan KPPN Gorontalo).



PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran bernilai Rp0 per tanggal 31 Desember 2021. Merupakan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pada satker di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Tabel C.1.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (Dalam rupiah)

SATKER	Jumlah Kas di bendahara Pengeluaran
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	0
KPPN Gorontalo	0
KPPN Marisa	0
Jumlah	0

C.2 PERSEDIAAN

Persediaan
Rp261.876.978

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp261.876.978 dan Rp236.808.853.

Rincian Barang persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.1 Rincian Persediaan Tahun 2021 dan 2020(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
117111 Barang Konsumsi	255.770.428	236.182.673
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	6.106.550	626.180
Jumlah	261.876.978	236.808.853

Tabel C.2.2 Rincian Persediaan menurut Satker Tahun 2021 (dalam rupiah)

No	Nama Satker	Barang Konsumsi (117111)	Bahan Pemeliharaan (117113)	Jumlah Persediaan
1	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	50.687.550	144.200	50.831.750
2	KPPN Gorontalo	32.742.106	4.909.850	37.651.956
3	KPPN Marisa	172.340.772	1.052.500	173.393.272
	Jumlah	255.770.428	6.106.550	261.876.978

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai persediaan KPPN Marisa terbesar diantara 3 Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Mayoritas persediaan barang konsumsi yang terdapat di KPPN Marisa berupa toner printer senilai Rp92.493.514,-. Nilai persediaan yang relatif besar ini dikarenakan letak KPPN Marisa yang jauh dari Kota Gorontalo (sekitar 130 km) dan mayoritas barang persediaan dibeli di Kota Gorontalo atau secara online yang membutuhkan biaya kirim dan waktu pengiriman yang relatif lama, sehingga untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dukungan operasional perkantoran diperlukan persediaan yang memadai pada KPPN Marisa.

Pada tanggal pelaporan, semua jenis persediaan pada Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tersebut berada dalam kondisi yang baik dengan rincian laporan barang persediaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3 TANAH

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 43.255.151.000 dan Rp43.169.726.000. Selama tahun 2021, terdapat transaksi penambahan atas nilai aset tanah pada seluruh satuan kerja lingkup Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo beralamat di Jl. Mohamad Yamin II. Aset berupa tanah lainnya terletak di Jl. Achmad Najamuddin No. 3 Gorontalo, Jl. Mawar Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Jl. Kalimantan Kota Gorontalo, Jl. Kartini No. 17 Gorontalo, Jl. Sultan Botutihe Gorontalo, Jl. Panca Krida Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman Gorontalo, Jl. M. Yamin Gorontalo Mutasi nilai tanah tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tanah
Rp43.255.151.000

Tabel C.3.1 Rincian Mutasi Nilai Tanah Tahun 2021 (dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	43.169.726.000
Mutasi tambah:	85.425.000
Pembelian	-
Perolehan Lainnya	85.425.000
Mutasi kurang:	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2021	43.255.151.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	43.255.151.000

Rincian BMN yang Dilakukan Koreksi Perubahan Nilai Berkurang

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas	Nilai	Keterangan
Semula								
1.	648741	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	7	36	275.000.000	
2.	648741	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	8	36	275.000.000	
Menjadi								
1.	648741	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	7	36	232.287.500	Koreksi Perubahan Nilai Berkurang senilai Rp42.712.500
2.	648741	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	8	36	232.287.500	Koreksi Perubahan Nilai Berkurang senilai Rp42.712.500
3.	648741	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	14	255	85.425.000	Perolehan Lainnya senilai Rp85.425.000
Nilai Perolehan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen NUP 7 dan NUP 8 berkurang dengan nilai total Rp85.425.000 yang selanjutnya menjadi nilai perolehan atas Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II.								

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Saldo sesuai dengan hasil sensus BMN tahun 2018 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terhadap tanah milik seluruh UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sejumlah 20 NUP objek revaluasi pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa tidak terdapat tanah berlebih ataupun tidak ditemukan pada seluruh Satker lingkup Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo.
- selama tahun 2021 terdapat mutasi tambah nilai tanah sebesar Rp85.425.000,- Pada tahun 2021, terdapat pembelian/ pengadaan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Atas aset tersebut, pada awalnya dicatat seluruhnya sebagai perolehan gedung/bangunan, namun selanjutnya dipisahkan menjadi perolehan tanah dan perolehan gedung/bangunan. Pencatatan atas nilai tanah dilakukan dengan menggunakan jurnal manual sehingga tercatat sebagai jenis transaksi perolehan lainnya.

Tabel C.3.2 Aset Tanah Per Satker Tahun 2021 (dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai Aset	Persentase Terhadap Total Aset Tanah
1	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	28.114.529.000	65,00%
2	KPPN Gorontalo	13.064.750.000	30,20%
3	KPPN Marisa	2.075.872.000	4,80%
Jumlah		43.255.151.000	100,00%

C.4 PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan
Mesin
Rp 14.231.889.636

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.231.889.636 dan Rp 15.068.105.226. Nilai aset peralatan dan mesin per satker pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel C.4.1 Nilai Peralatan dan Mesin Per Satker Tahun 2021 (dalam rupiah)

No	Nama Satker	TA 2021		TA 2020	
		Nilai Aset	Persentase Terhadap Total Peralatan dan Mesin	Nilai Aset	Persentase Terhadap Total Peralatan dan Mesin
1	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	6.889.584.683	48%	6.734.175.402	45%
2	KPPN Gorontalo	3.846.708.463	27%	4.980.382.837	33%
3	KPPN Marisa	3.495.596.490	25%	3.353.546.987	22%
Jumlah		14.231.889.636	100%	15.068.105.226	100%

Tabel C.4.2 Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker TA 2021 (dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	15.068.105.226
Mutasi tambah:	1.916.831.533
Pembelian	532.582.530
Transfer Masuk	237.335.852
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.146.913.151
Penerimaan aset tetap renovasi	-
Mutasi kurang:	(2.753.047.123)
Hibah Keluar	(1.146.913.151)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.606.133.972)
Saldo per 31 Desember 2021	14.231.889.636
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(12.158.467.841)
Nilai buku persediaan per 31 Desember 2021	2.073.421.795

Mutasi tambah transaksi peralatan dan mesin pada TA 2021 terdiri dari transaksi pembelian/pengadaan sebesar Rp 532.582.530, transfer masuk sebesar Rp 237.335.852, dan Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp 1.146.913.151.

Selain itu terdapat mutasi kurang berupa penghentian dari penggunaan sebesar (Rp 1.606.133.972) dan Hibah Keluar sebesar (Rp 1.146.913.151). Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 sebesar (Rp 12.158.467.841), serta nilai Buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.073.421.795,-.

Tabel C.4.3 Rincian Saldo Awal Peralatan dan Mesin Per Tahun 2021 (dalam rupiah)

Uraian	NILAI
ALAT BESAR	529.221.634
ALAT ANGKUTAN	2.463.389.500
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	21.032.000
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	5.644.648.630
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.779.689.788
ALAT KEDOTERAN DAN KESEHATAN	41.538.000
KOMPUTER	4.588.585.674
TOTAL	15.068.105.226

Saldo awal peralatan dan mesin berjumlah Rp15.068.105.226.

Tabel C.4.4 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Per Tahun 2021 (dalam rupiah)

Uraian	NILAI
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	507.378.230
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	10.191.300
KOMPUTER	15.013.000
TOTAL	532.582.530

Mutasi Pembelian peralatan dan mesin yang berasal dari Pembelian berjumlah Rp532.582.530

Tabel C.4.5 Rincian transfer masuk Peralatan dan Mesin Per Tahun 2021 (dalam rupiah)

Uraian	NILAI
KOMPUTER	237.335.852
TOTAL	237.335.852

Transfer masuk sebesar Rp237.335.852 sebagai mutasi tambah pada peralatan dan mesin.

Tabel C.4.6 Rincian Penghentian dari Pengguna Per Tahun 2021 (dalam rupiah)

Uraian	NILAI
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	692.702.068
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	30.022.700
KOMPUTER	424.188.383
TOTAL	1.146.913.151

Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp1.146.913.151 sebagai mutasi tambah pada peralatan dan mesin.

Tabel C.4.7 Rincian Hibah Keluar Per Tahun 2021 (dalam rupiah)

Uraian	NILAI
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	(692.702.068)
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	(30.022.700)
KOMPUTER	(424.188.383)
TOTAL	(1.146.913.151)

Mutasi kurang peralatan dan mesin yang berasal dari Transfer Keluar berjumlah (Rp1.146.913.151)

Tabel C.4.8 Rincian Penghentian aset dari penggunaan Per Tahun 2021(dalam rupiah)

Uraian	NILAI
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	(789.826.068)
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	(39.922.700)
KOMPUTER	(776.385.204)
TOTAL	(1.606.133.972)

Mutasi kurang peralatan dan mesin yang berasal dari Penghentian aset dari penggunaan berjumlah (Rp1.606.133.972)

C.5 GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan
Bangunan
Rp23.054.605.235

Saldo Gedung dan Bangunan tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 23.054.605.235 dan Rp22.034.860.235. Nilai Gedung dan Bangunan per satker pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.1 Nilai Gedung dan Bangunan Per Satker TA 2021 (dalam rupiah)

No	Nama Satker	TA 2021		TA 2020	
		Nilai Aset	Persentase Terhadap Total Gedung dan Bangunan	Nilai Aset	Persentase Terhadap Total Gedung dan Bangunan
1	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	13.282.483.385	57,61%	12.262.738.385	55,65%
2	KPPN Gorontalo	6.756.507.850	29,31%	6.756.507.850	30,66%
3	KPPN Marisa	3.015.614.000	13,08%	3.015.614.000	13,69%
Jumlah		23.054.605.235	100,00%	22.034.860.235	100%

Tabel C.5.2 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per Satker Tahun 2021(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	22.034.860.235
Mutasi tambah:	2.154.826.715
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	550.000.000
Reklasifikasi Masuk	1.049.656.715
Pengembangan Melalui KDP	555.170.000
Mutasi kurang:	1.135.081.715
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(85.425.000)
Reklasifikasi Keluar	(1.049.656.715)
Saldo per 31 Desember 2021	23.054.605.235
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	2.639.409.970
Nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	20.415.195.265

Terdapat mutasi tambah dan kurang pada Gedung dan Bangunan selama Tahun 2021, seluruhnya terdapat pada Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Gedung dan bangunan yang diperoleh dari penyelesaian pembangunan melalui KDP adalah untuk pembelian / pengadaan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen seharga Rp550.000.000.
- Gedung dan bangunan yang diperoleh dari penyelesaian pembangunan melalui pengembangan melalui KDP adalah untuk renovasi gedung kantor untuk keperluan pelaksanaan Activity Based Workplace (ABW) dan renovasi rumah dinas dengan total sebesar Rp555.171.000.
- Terdapat reklasifikasi masuk sebesar Rp Rp1.049.656.715 dan reklasifikasi keluar sebesar (Rp1.049.656.715), yaitu perubahan golongan rumah dinas kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo dari rumah negara golongan II Tipe C permanen menjadi rumah negara Golongan I Tipe C Permanen.

- Terdapat mutasi keluar berupa Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar (Rp85.425.000) disebabkan adanya revaluasi aset yang sebelumnya merupakan nilai perolehan Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen NUP 7 dan NUB 8 berkurang dengan nilai total Rp85.425.000,- yang selanjutnya dicatat sebagai Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II.
- Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.639.409.970,- sehingga nilai buku gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp20.415.195.265,-

C.6 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp196.299.500 dan Rp196.299.500. Nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan per satker pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp196.299.500

Tabel C.6.1 Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Satker Tahun 2021 dan 2020 dalam rupiah)

No	Nama Satker	TA 2021		TA 2020	
		Nilai Aset	Persentase Terhadap Total Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Nilai Aset	Persentase Terhadap Total Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	123.352.500	63%	123.352.500	63%
2	KPPN Gorontalo	54.627.000	28%	54.627.000	28%
3	KPPN Marisa	18.320.000	9%	18.320.000	9%
Jumlah		196.299.500	100%	196.299.500	100%

Tabel C.6.2 Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Output Tahun 2021 dan 2020(dalam rupiah)

Uraian	Nominal	
	TA 2021	TA 2020
Jalan dan Jembatan	73.856.000	73.856.000
Irigasi	54.627.000	54.627.000
Jaringan	67.816.500	67.816.500
Total	196.299.500	196.299.500

Tabel C.6.3 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Satker TA 2021 (dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	196.299.500
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset Tetap (Irigasi)	-
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2021	196.299.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	96.207.538
Nilai buku persediaan per 31 Desember 2021	100.091.962

Tidak ada mutasi masuk maupun keluar selama Tahun 2021. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.207.538,- sehingga nilai buku yang gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp100.091.962,-.

C.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp15.196.459.683)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp15.196.459.683) dan (Rp14.851.960.239). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel C.7.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 (dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	%
1	Tanah	43.255.151.000	-	43.255.151.000	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	14.231.889.636	12.158.467.841	2.073.421.795	81,63%
3	Gedung dan Bangunan	23.054.605.235	2.639.409.970	20.415.195.265	17,72%
4	Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	196.299.500	96.207.538	100.091.962	0,65%
	Akumulasi Penyusutan	80.737.945.371	14.894.085.349	65.843.860.022	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sudah mencapai 81,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa peralatan dan mesin yang terdapat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah memasuki akhir masa manfaat dan harus segera dilakukan penggantian/pembaharuan.

C.8 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN

Aset Lain-Lain
Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp61.204.200. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.8.1 Rincian Nilai Aset Lain-Lain Per Satker Tahun 2021 (dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi tambah:	0
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)	0
Mutasi kurang:	0
- Transfer Keluar (302)	-
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) (396)	0
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif (402)	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai buku persediaan per 31 Desember 2021	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp0 dengan nilai mutasi kurang dari sisi Mutasi Keluar, Penghapusan BMN, Usulan barang rusak berat dan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktifnya sebesar 0

C.9 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0 dan (Rp61.204.200). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel C.9.1 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2021

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	%
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	0	0	-	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	-	0

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0*

C.10 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp53.284.460,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Ini merupakan Tagihan Air bulan Desember 2021, Tagihan listrik Bulan Desember 2021 serta 2020, Tagihan telepon Bulan Desember 2021 serta 2020 tagihan bulan Desember baru ada per Januari 2021 dan 2022.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp53.284.460*

Tabel C.10.1 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2021 (dalam rupiah)

No	Belanja Barang yang masih Harus Dibayarkan	Keterangan	Nilai Perolehan
1		Tagihan Air bulan Desember 2021 Kanwil Gorontalo	Rp2.076.000
2	Tagihan Air bulan Desember 2021	Tagihan Air bulan Desember 2021 KPPN Gorontalo	Rp518.315
3		Tagihan Air Bulan Desember 2021 KPPN Marisa	Rp307.250
1		Tagihan Listrik bulan Desember 2021 Kanwil Gorontalo	Rp18.081.752
2	Tagihan Listrik bulan Desember 2021	Tagihan Listrik bulan Desember 2021 KPPN Gorontalo	Rp16.025.831
3		Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 KPPN Marisa	Rp9.209.850
1		Tagihan Telepon bulan Desember 2021 Kanwil Gorontalo	Rp3.592.432
2	Tagihan Telepon bulan Desember 2021	Tagihan Telepon bulan Desember 2021 KPPN Gorontalo	Rp1.024.210
3		Tagihan Telepon Bulan Desember 2021 KPPN Marisa	Rp2.448.820
TOTAL			Rp53.284.460

C.11 UANG MUKA KPPN

Uang Muka KPPN TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang muka KPPN merupakan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara per 31 Desember 2021.

*Uang Muka KPPN
Rp0,-*

C.12 EKUITAS

Ekuitas per TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp66.052.452.540 dan Rp65.850.492.008. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Dengan nilai kewajiban Rp53.284.460, maka ekuitas TA 2021 tidak sama dengan nilai Aset, yaitu jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp66.105.737.000. Nilai ekuitas didapatkan berdasarkan nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

*Ekuitas
Rp66.052.452.540*

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan PNB
Rp600.000

Pendapatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk periode tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp600.000 dan Rp0. Pada tahun 2020, satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tidak memperoleh pendapatan dari sektor PNB. Berikut ini perbandingan Pendapatan PNB Tahun 2021 dan 2020.

Tabel D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK(TURUN)%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	600.000	-	100
Pendapatan Lain-lain	-	-	-

-Terdapat transaksi secara normal juga terdapat pendapatan pada satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Yaitu pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp600.000,- hasil persewaan tanah/bangunan di wilayah KPPN Gorontalo sejak Bulan November 2021. Rincian sebagai berikut :

Tabel D.1.2 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (dalam rupiah)

Yang disewakan	Lokasi	Peruntukan	Jangka Waktu	Nilai Sewa Per Bulan (Rp)
Tanah/bangunan kantor pemerintahan KPPN Gorontalo sebesar 12,25 m/2	Jalan Jendral Sudirman, Wumialo, Kota Tengah, Kota Gorontalo	Kantin	1 (satu) Tahun/ Bulanan	300.000

- Adanya implementasi kebijakan sentralisasi gaji yang berlaku efektif pada Desember 2017 berdampak pada hilangnya PNB dari penerimaan pendapatan pengelolaan BMN (sewa rumah dinas pegawai) dan pendapatan lain-lain (Persekot gaji). Selain itu, transaksi secara normal juga diestimasikan tidak terdapat pendapatan pada satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai
Rp1.083.843.000

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.083.843.000 dan Rp1.003.700.000.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel D.2.1 Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK/(TURUN)%
511129	Beban Uang Makan PNS	648.934.000	623.823.000	4,03%
511211	Beban Lembur PNS	434.909.000	379.877.000	14,49%
JUMLAH		1.083.843.000	1.003.700.000	7,98%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat Kenaikan jumlah beban pegawai pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2020 yaitu sebesar 7,98%. Besaran beban pegawai dipengaruhi oleh jumlah pegawai, beban kerja pegawai, dan komposisi pegawai yang mengalami perubahan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selain itu penurunan disebabkan oleh menurunnya jumlah pegawai yang melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja akibat adanya pandemi COVID-19.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada tahun Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp88.382.029 dan Rp108.625.647 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Beban Persediaan
Rp88.382.029*

Tabel D.3.1 Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	88.382.029	108.625.647	(18,64)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	88.382.029	108.625.647	(18,64)

Beban Persediaan per 31 Desember 2021 turun sebesar (18,64%) dibandingkan Beban Persediaan per 31 Desember 2020 Hal ini menunjukkan kebutuhan penggunaan persediaan meningkat. Hal ini menunjukkan kebutuhan penggunaan persediaan meningkat diakibatkan adanya pelaksanaan *New Normal Work From Office 50%* jumlah Pegawai Kantor pada masa pandemi Covid-19.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.735.643.832 dan Rp2.894.784.426. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Beban Barang
dan Jasa
Rp2.735.643.832*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
521111 Beban Keperluan Perkantoran	1.186.060.516	1.170.123.782	1,36%
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.595.795	22.900.090	(27,53%)
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	371.992.000	382.810.000	(2,83%)
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	217.046.122	263.391.663	(17,60%)
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53.419.107	90.316.231	(40,85%)
521211 Beban Bahan	105.165.076	202.140.987	(47,97%)
521213 Beban Honor Output Kegiatan	35.780.000	32.880.000	8,82%
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	69.846.361	37.802.993	84,76%
521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	46.433.969	(100,00%)
522111 Beban Langganan Listrik	479.072.699	455.642.867	5,02%
522112 Beban Langganan Telepon	94.506.505	83.956.625	12,65%
522113 Beban Langganan Air	30.132.445	38.705.448	(22,03%)
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.952.206	15.360.771	36,40%
522141 Beban Sewa	4.400.000	734.000	499,46%
522151 Beban Jasa Profesi	33.700.000	16.000.000	110,63%
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16.975.000	35.585.000	(52,30%)
Jumlah Beban	2.735.643.832	2.894.784.426	(5,51%)

Beban barang dan jasa pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (5,57%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup besar adalah Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19, beban barang operasional lainnya, serta Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19. Tahun 2021, terdapat beban baru, namun tidak dipakainya akun Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 dan beban sewa.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan
Rp1.319.222.184

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.319.222.184 dan Rp1.496.811.851. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5.1 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	615.560.688	749.239.307	(17,84%)
523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		27.777.360	(100%)
523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58.472.000	70.208.100	(16,72%)
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	593.285.326	537.293.100	10,42%
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	51.904.170	112.293.984	(53,78%)
Jumlah	1.319.222.184	1.496.811.851	(11,86%)

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar (11,86%) dan hampir seluruh jenis beban mengalami penurunan yaitu Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya menurun sebesar (17,84%), beban Pemeliharaan gedung dan bangunan turun (16,72%), Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan turun sebesar (53,78%) serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik sebesar 10,42% karena kondisi peralatan dan mesin pada Lingkup Kanwil Gorontalo hampir keseluruhan adalah barang lama sehingga memerlukan beban pemeliharaan yang banyak untuk mempertahankan ke kondisi normal sedangkan terdapat akun yang hilang beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Covid-19 turun sebesar (100%).

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan
Dinas
Rp380.834.726

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp380.834.726 dan Rp503.330.176. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6.1 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
524111 Beban Perjalanan Biasa	230.615.636	328.373.476	(29,77%)
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.470.000	49.730.000	64%
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55.389.090	105.576.700	(47,54%)
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.360.000	0	100%
524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	19.650.000	(100%)
Jumlah	380.834.726	503.330.176	(24,34%)

Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (24,34%) yang disebabkan oleh adanya Efisiensi perjalanan dinas pada masa Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Lingkup Kanwil Gorontalo sudah mengadakan Rakorwil Wilayah yang menyebabkan Beban pembiayaan Paket meeting dalam kota dan Luar kota.

D.7 | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.602.153.741 dan Rp1.518.794.346. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.602.153.741*

Tabel D.7.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	974.422.856	916.476.662	6,32%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	614.425.106	588.632.708	4,38%
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.847.467	9.847.467	0,00%
591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.820.900	2.200.097	(17,24%)
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.637.412	1.637.412	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan		1.602.153.741	1.518.794.346	5,49%
Beban Amortisasi		-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		1.602.153.741	1.518.794.346	5,49%

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan beban Tahun 2020 sebesar 5,49%.

D.8 | SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan kegiatan operasional pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selama Tahun 2021, yaitu pendapatan operasional sebesar Rp600.000 dan beban operasional sebesar Rp7.210.079.512 maka pada Tahun 2021 diperoleh Defisit Dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp7.209.479.512).

*Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
(Rp7.209.479.512)*

D.9 | SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp22.169.996 dan Rp22.695.679. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp22.169.996*

Tabel D.9.1 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	12.919.996	24.124.000	(46,44%)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12.955.496	29.760.000	(56,47%)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	35.500	5.636.000	(99,37%)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.250.000	(1.428.321)	547,61%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.250.000	1.192.920	675,41%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	2.621.241	(100,00%)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	22.169.996	22.695.679	(2,32%)

**) Pendapatan/Beban kegiatan non operasional lainnya merupakan pendapatan/beban penyesuaian nilai persediaan yang muncul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO). Pada Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mulai 2021 penilaian persediaan menggunakan Metode FIFO.*

D.10 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2021 dan 2020.

D.11 SURPLUS/ DEFISIT LO

Surplus/ Defisit LO (Rp7.186.309.516) Berdasarkan surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp7.209.479.512) dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp22.169.996 serta tidak adanya pos luar biasa pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selama Tahun 2021, maka pada Tahun 2021 diperoleh Nilai Defisit-LO Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebesar (Rp7.187.309.516) .

D.12 PENGUNGKAPAN BEBAN KHUSUS PENANGANAN PANDEMI COVID PADA LAPORAN OPERASIONAL

Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 Rp82.452.922 Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp82.452.922 dan Rp200.112.560 Rincian Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagai berikut:

Tabel D.12.1 Beban Khusus Pandemi Covid 19 Tahun 2021 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53.419.107	90.316.231	(40.85%)
521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	46.433.969	(100%)
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16.975.000	35.585.000	(52.30%)
523114 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	27.777.360	(100%)
524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0%
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	12.058.815	0	100%
Jumlah	82.452.922	200.112.560	(58,80%)

Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 penurunannya sebesar (58,80%). Beban pada tahun 2020 meliputi Beban Barang operasional Penanganan Pandemi dan Beban Jasa Penanganan Pandemi.



PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp65.850.492.008

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp65.850.492.008 dan Rp65.753.478.352.

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
(Rp7.187.309.516)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp7.187.309.516) dan (Rp7.503.350.767). Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos-pos luar biasa sebagaimana yang terdapat dalam Laporan Operasional.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas
(Rp50.245.881)

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp50.245.881) dan Rp9.406.373. Pada 2021 tidak terdapat koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas.

E.3.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp0

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp3.228.373-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena Revaluasi Aset. Tujuan untuk menormalisasi revaluasi aset.

E.3.2 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp6.178.000.

E.3.3 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(Rp50.245.881)

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp50.245.881,-) dan Rp0-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena Revaluasi Aset. Tujuan untuk menormalisasi revaluasi aset.

E.4 | TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.439.515.929 dan Rp 7.439.515.929. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Transaksi Antar Entitas
Rp7.439.515.929*

Tabel E.4.1 Perbandingan Transaksi Antar Entitas Tahun 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Ditagihkan ke Entitas lain	7.267.707.847	7.047.362.080
Diterima dari Entitas Lain	(24.491.971)	(29.760.000)
Transfer Masuk	194.613.578	(20.306.000)
Transfer Keluar	1.686.475	593.661.970
TOTAL	7.439.515.929	7.439.515.929

Rincian Transaksi Antar Entitas untuk setiap satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel E.4.2 Rincian Transaksi Antar Entitas Per Satker Tahun 2021

Uraian	Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	KPPN Gorontalo	KPPN Marisa	Seluruh Satker
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.058.316.889	1.868.209.947	1.341.181.011	7.267.707.847
Diterima dari Entitas Lain	(4.734.908)	(13.601.475)	(6.155.588)	(24.491.971)
Transfer Keluar	-	1.686.475	-	1.686.475
Transfer Masuk	34.926.750	64.090.470	95.596.358	194.613.578
Jumlah	4.088.508.731	1.920.385.417	1.430.621.781	7.439.515.929

Sebagaimana informasi pada tabel, transaksi antar entitas terdiri dari Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL), Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Transfer Masuk, dan Transfer Keluar (dan minus pada DDEL dan Transfer Keluar menunjukkan bahwa sifat operasi berkebalikan dengan DKEL dan Transfer Masuk).

Ditagihkan ke Entitas lain adalah transaksi-transaksi belanja melalui proses penerbitan SPM/SP2D, jumlahnya adalah sesuai dengan realisasi anggaran Tahun 2021 yaitu sebesar Rp7.267.707.847

Diterima dari entitas lain adalah transaksi-transaksi pendapatan yang diterima dari pihak lain selama Tahun 2021, jumlahnya adalah sama dengan realisasi pendapatan Tahun 2021, yaitu sebesar (Rp24.491.971).

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL atau antar KL. Transfer Masuk pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp194.613.578 dan transfer keluar sebesar Rp1.686.475,- dengan rincian sebagai berikut.

E.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp66.052.452.540

Nilai Ekuitas periode berakhir Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp66.052.452.540 dan Rp65.850.492.008.



F PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Ada kejadian penting setelah tanggal neraca, yaitu rekomendasi dari BPK pada Laporan Keuangan dari *Unaudited* ke *Audited* Tahun 2021 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA 015.08) Tahun 2021 Yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) Nomor : NKF-015.08/-/PB.6/2022 Tanggal 22 April 2022. Rekomendasi berupa pencatatan Jurnal Koreksi pada Belanja Listrik, Telpn, dan Air dengan nilai Rp50.690.145,- Tagihan Desember 2021 yang tagihannya baru ada di Januari 2022. Dengan penambahan Jurnal Koreksi ini merubah angka pada Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada Neraca *Unaudited* jumlah ekuitas sebesar Rp66.103.142.685,- sementara pada *Audited* turun sebesar Rp66.052.452.340,- serta jumlah kewajiban semula sebesar Rp2.594.315,- pada *Unaudited* berubah menjadi sebesar Rp53.284.460,- pada *Audited*. Perbedaan nilai *Unaudited* ke *Audited* terjadi juga pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dengan nilai perubahan yang sama.





MONUMEN NANI WARTABONE

Monumen Nani Wartabone dibangun untuk mengenang jasa pahlawan kemerdekaan Nani Wartabone yang berhasil memimpin gerakan patriotisme masyarakat Gorontalo untuk melawan penjajah sehingga rakyat Gorontalo dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942. Monumen ini dibangun sekitar tahun 1987 pada masa pemerintahan Walikota Gorontalo Drs. A. Nadjamudin. Monumen ini terletak tepat di depan rumah Dinas Gubernur Gorontalo saat ini.



LAMPIRAN PENDUKUNG

**Laporan
Keuangan E-
REKON LK**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
WILAYAH/PROVINSI : KANWIL GORONTALO 01508026KD

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 18/05/22 3:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_uappaw_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	24,491,971	24,491,971	0	0	29,760,000	29,760,000	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	24,491,971	24,491,971	0	0	29,760,000	29,760,000	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	1,086,384,000	1,083,843,000	(2,541,000)	100	1,009,552,000	1,003,700,000	(5,852,000)	99
	BELANJA BARANG	4,600,078,000	4,546,112,317	(53,965,683)	99	5,040,989,000	4,949,000,695	(91,988,305)	98
	BELANJA MODAL	1,643,021,000	1,637,752,530	(5,268,470)	100	1,112,949,000	1,094,661,385	(18,287,615)	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	7,329,483,000	7,267,707,847	(61,775,153)	99	7,163,490,000	7,047,362,080	(116,127,920)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08
WILAYAH/PROVINSI :

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
KANWIL GORONTALO

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 18/05/22 4:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_uappaw

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	53,538,000	53,419,107	0	53,419,107	99.78	118,893
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	53,538,000	53,419,107	0	53,419,107	99.78	118,893
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	30,000,000	12,176,000	12,058,815	0	12,058,815	99.04	117,185
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	30,000,000	12,176,000	12,058,815	0	12,058,815	99.04	117,185
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	17,275,000	16,975,000	0	16,975,000	98.26	300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	17,275,000	16,975,000	0	16,975,000	98.26	300,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	30,000,000	82,989,000	82,452,922	0	82,452,922	99.35	536,078
	JUMLAH BELANJA	30,000,000	82,989,000	82,452,922	0	82,452,922	99.35	536,078

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI :

KANWIL GORONTALO

Tgl. Cetak 18/05/2022

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw --

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	236,182,673	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	626,180	0
0.0	131111	Tanah	43,169,726,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	15,068,105,226	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	22,034,860,235	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	73,856,000	0
0.0	134112	Irigasi	54,627,000	0
0.0	134113	Jaringan	67,816,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	12,747,421,183
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,024,984,864
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	34,466,132
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,373,150
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	42,062,477
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	61,204,200	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	61,204,200
0.0	391111	Ekuitas	0	65,850,492,008
JUMLAH			80,767,004,014	80,767,004,014

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROVINSI : KANWIL GORONTALO

Kode Lap : LO.WIL
Tanggal : 18/05/22 3:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_wilayah --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	600,000	0	600,000	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	600,000	0	600,000	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	600,000	0	600,000	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	1,083,843,000	1,003,700,000	80,143,000	-
Beban Persediaan	88,382,029	108,625,647	(20,243,618)	-
Beban Barang dan Jasa	2,735,643,832	2,894,784,426	(159,140,594)	-
Beban Pemeliharaan	1,319,222,184	1,496,811,851	(177,589,667)	-
Beban Perjalanan Dinas	380,834,726	503,330,176	(122,495,450)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROVINSI : KANWIL GORONTALO

Kode Lap : LO.WIL
Tanggal : 18/05/22 3:59 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_wilayah --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,602,153,741	1,518,794,346	83,359,395	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	7,210,079,512	7,526,046,446	(315,966,934)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,209,479,512)	(7,526,046,446)	316,566,934	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	12,919,996	24,124,000	(11,204,004)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12,955,496	29,760,000	(16,804,504)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	35,500	5,636,000	(5,600,500)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,250,000	(1,428,321)	10,678,321	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,250,000	1,192,920	8,057,080	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,621,241	(2,621,241)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	22,169,996	22,695,679	(525,683)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,187,309,516)	(7,503,350,767)	316,041,251	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,187,309,516)	(7,503,350,767)	316,041,251	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROVINSI : KANWIL GORONTALO

Kode Lap : LPE.WIL
Tanggal : 18/05/22 3:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_uappaw --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	65,850,492,008	65,753,478,352	97,013,656	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,187,309,516)	(7,503,350,767)	316,041,251	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(50,245,881)	9,406,373	(59,652,254)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	6,178,000	(6,178,000)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	3,228,373	(3,228,373)	-
LAIN-LAIN	(50,245,881)	0	(50,245,881)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,439,515,929	7,590,958,050	(151,442,121)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	201,960,532	97,013,656	104,946,876	-
EKUITAS AKHIR	66,052,452,540	65,850,492,008	201,960,532	-

**Laporan
Keuangan
SAKTI**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (UNAUDITED)
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
 Tanggal : 18-05-2022
 Halaman : 1
 Prog Id : lu_pastk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH PROVINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI	0	24,491,971	24,491,971	-
A.I.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	24,491,971	24,491,971	-
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	24,491,971	24,491,971	-
A.I.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	24,491,971	24,491,971	-
B	BELANJA NEGARA				
B.I	BELANJA TRANSAKSI	7,329,483,000	7,267,707,847	(61,775,153)	99,16
B.I.1	Rupiah Murni	7,329,483,000	7,267,707,847	(61,775,153)	99,16
B.I.1.a	Belanja Pegawai	1,086,384,000	1,083,843,000	(2,541,000)	99,77
B.I.1.b	Belanja Barang	4,600,078,000	4,546,112,317	(53,965,683)	98,83
B.I.1.c	Belanja Modal	1,643,021,000	1,637,752,530	(5,268,470)	99,68
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-
B.I.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	7,329,483,000	7,267,707,847	(61,775,153)	99,16
C	PEMBIAYAAN				
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-

N E R A C A (UNAUDITED)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DES 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON 1 : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

WILAYAH/PROVINSI : 2600

KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	261,876,978	236,808,853	25,068,125	11
Jumlah ASET LANCAR	261,876,978	236,808,853	25,068,125	11
ASET TETAP				
Tanah	43,255,151,000	43,169,726,000	85,425,000	0
Peralatan dan Mesin	14,231,889,636	15,068,105,226	(836,215,590)	(6)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,158,467,841)	(12,747,421,183)	588,953,342	(5)
Peralatan dan Mesin (Netto)	2,073,421,795	2,320,684,043	(247,262,248)	(11)
Gedung dan Bangunan	23,054,605,235	22,034,860,235	1,019,745,000	5
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,639,409,970)	(2,024,984,864)	(614,425,106)	30
Gedung dan Bangunan (Netto)	20,415,195,265	20,009,875,371	405,319,894	2
Jalan, Irigasi dan Jaringan	196,299,500	196,299,500	0	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(96,207,538)	(82,901,759)	(13,305,779)	16
Jalan, Irigasi dan Jaringan (Netto)	100,091,962	113,397,741	(13,305,779)	(12)
Jumlah ASET TETAP	65,843,860,022	65,613,683,155	230,176,867	0
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	61,204,200	(61,204,200)	(100)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(61,204,200)	61,204,200	(100)
Jumlah ASET LAINNYA	0	0	0	-
Jumlah ASET	66,105,737,000	65,850,492,008	255,244,992	0
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga I	53,284,460	0	53,284,460	-
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	53,284,460	0	53,284,460	-
Jumlah KEWAJIBAN	53,284,460	0	53,284,460	-
EKUITAS				
EKUITAS				
EKUITAS	66,052,452,540	65,850,492,008	201,960,532	0
Jumlah EKUITAS	66,052,452,540	65,850,492,008	201,960,532	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	66,105,737,000	65,850,492,008	255,244,992	0

N E R A C A (UNAUDITED)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DES 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015
ESELON 1 :08
WILAYAH/PROVINSI :2600

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

NERACA PERCOBAAN (UNAUDITED)

TINGKAT WILAYAH
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015

KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON 1 :08

DITJEN PERBENDAHARAAN

WILAYAH/PROVINSI :2600

KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	117111	Barang Konsumsi	255,770,428	0
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,106,550	0
2	131111	Tanah	43,255,151,000	0
2	132111	Peralatan dan Mesin	14,231,889,636	0
2	133111	Gedung dan Bangunan	23,054,605,235	0
2	134111	Jalan dan Jembatan	73,856,000	0
2	134112	Irigasi	54,627,000	0
2	134113	Jaringan	67,816,500	0
2	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	12,158,467,841
2	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,639,409,970
2	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	44,313,599
2	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	8,194,050
2	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	43,699,889
2	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	53,284,460
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,267,707,847
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,491,971	0
2	313211	Transfer Keluar	0	1,686,475
2	313221	Transfer Masuk	0	194,613,578
2	391111	Ekuitas	0	65,850,492,008
2	391119	Koreksi Lainnya	50,245,881	0
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,799,497
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	155,999
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	600,000
2	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	9,250,000
2	511129	Beban Uang Makan PNS	649,004,000	0
2	512211	Beban Uang Lembur	434,909,000	0
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,186,060,516	0
2	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,595,795	0
2	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	371,992,000	0
2	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	217,046,122	0
2	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53,419,107	0
2	521211	Beban Bahan	105,165,076	0
2	521213	Beban Honor Output Kegiatan	35,780,000	0
2	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	69,846,361	0
2	522111	Beban Langganan Listrik	479,072,699	0
2	522112	Beban Langganan Telepon	94,506,505	0
2	522113	Beban Langganan Air	30,132,445	0
2	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20,952,206	0
2	522141	Beban Sewa	4,400,000	0
2	522151	Beban Jasa Profesi	33,700,000	0
2	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16,975,000	0

NERACA PERCOBAAN (UNAUDITED)TINGKAT WILAYAH
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROVINSI :2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	615,560,688	0
2	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58,472,000	0
2	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	593,285,326	0
2	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	230,615,636	0
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,470,000	0
2	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55,389,090	0
2	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,360,000	0
2	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	974,422,856	0
2	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	614,425,106	0
2	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	9,847,467	0
2	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,820,900	0
2	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,637,412	0
2	593111	Beban Persediaan konsumsi	88,382,029	0
2	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	51,904,170	0
2	596111	Kerugian Pelepasan Aset	35,500	0
7	511129	Beban Uang Makan PNS	0	70,000
JUMLAH			88,284,745,213	88,284,745,213

NERACA PERCOBAAN (UNAUDITED)

TINGKAT WILAYAH
PEMBUKUAN DASAR KAS
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROVINSI :2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,267,707,847
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,491,971	0
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,799,497
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	155,999
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	600,000
2	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	9,250,000
2	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,686,475
2	511129	Belanja Uang Makan PNS	649,004,000	0
2	512211	Belanja Uang Lembur	434,909,000	0
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,186,060,516	0
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,595,795	0
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	371,992,000	0
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	217,046,122	0
2	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	53,419,107	0
2	521211	Belanja Bahan	105,165,076	0
2	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	35,780,000	0
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	69,846,361	0
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	153,295,509	0
2	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	12,058,815	0
2	522111	Belanja Langganan Listrik	478,511,124	0
2	522112	Belanja Langganan Telepon	94,576,066	0
2	522113	Belanja Langganan Air	27,585,880	0
2	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20,952,206	0
2	522141	Belanja Sewa	4,400,000	0
2	522151	Belanja Jasa Profesi	33,700,000	0
2	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16,975,000	0
2	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	615,560,688	0
2	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58,472,000	0
2	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	593,285,326	0
2	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	230,615,636	0
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,470,000	0
2	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55,389,090	0
2	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,360,000	0
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532,582,530	0
2	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550,000,000	0
2	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	555,170,000	0
2	815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	180,000,000
2	815511	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	609,947,000
2	825111	Pengeluaran Uang Persediaan	180,000,000	0
2	825511	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	609,947,000	0
7	511129	Belanja Uang Makan PNS	0	70,000

NERACA PERCOBAAN (UNAUDITED)

TINGKAT WILAYAH
PEMBUKUAN DASAR KAS
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS
Tanggal : 18-05-2022
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 :08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROVINSI :2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
JUMLAH			8,082,216,818	8,082,216,818

LAPORAN OPERASIONAL (UNAUDITED)
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH/PROVINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

NAMA PERKIRAAN	2021
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	600,000
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	600,000
425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	600,000
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	600,000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	1,083,843,000
511129 Beban Uang Makan PNS	648,934,000
512211 Beban Uang Lembur	434,909,000
Beban Persediaan	88,382,029
593111 Beban Persediaan konsumsi	88,382,029
593149 Beban persediaan lainnya	0
Beban Barang dan Jasa	2,735,643,832
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,595,795
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20,952,206
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16,975,000
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	371,992,000
522151 Beban Jasa Profesi	33,700,000
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	217,046,122
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	69,846,361
521211 Beban Bahan	105,165,076
522141 Beban Sewa	4,400,000
521841 Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (UNAUDITED)
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31-DES-2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : TINGKAT WILAYAH

Tanggal : 18-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH PROVINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31-DES-2021	31 DES 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	65,850,492,008	65,753,478,352	97,013,656	0
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	(7,187,309,516)	(7,503,350,767)	316,041,251	(4)
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /	(50,245,881)	9,406,373	(59,652,254)	(634)
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	6,178,000	(6,178,000)	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,228,373	(3,228,373)	-
3.f	Koreksi Lain-lain	(50,245,881)	0	(50,245,881)	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,439,515,929	7,590,958,050	(151,442,121)	(2)
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	201,960,532	97,013,656	104,946,876	108
6	EKUITAS AKHIR	66,052,452,540	65,850,492,008	201,960,532	0

MEMO

Laporan

Keuangan

JURNAL MANUAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2021-06

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO
 SATUAN KERJA : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 20-05-2022
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
30-06-2021	001/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Manual Saldo Tukin pada Tanggal 30 Juni 2021	648741.050.212191.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	212191	AKRUAL	562,894,691	0	Sudah
30-06-2021	001/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Manual Saldo Tukin pada Tanggal 30 Juni 2021	648741.050.111821.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	111821	AKRUAL	0	562,894,691	Sudah
						562,894,691	562,894,691	

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2021-07

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO
 SATUAN KERJA : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 20-05-2022
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
01-07-2021	002/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Balik atas Manual Saldo Nomor 001/WPB.29/BG.010 2/2021	648741.050.212191.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	212191	AKRUAL	0	562,894,691	Sudah
01-07-2021	002/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Balik atas Manual Saldo Nomor 001/WPB.29/BG.010 2/2021	648741.050.111821.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	111821	AKRUAL	562,894,691	0	Sudah
						562,894,691	562,894,691	

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2021-09

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROPINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO
SATUAN KERJA : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 20-05-2022
Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
30-09-2021	003/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Manual Saldo Tukin pada 30 September 2021	648741.050.111821.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	111821	AKRUAL	0	623,425,239	Sudah
30-09-2021	003/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Manual Saldo Tukin pada 30 September 2021	648741.050.212191.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	212191	AKRUAL	623,425,239	0	Sudah
						623,425,239	623,425,239	

JURNAL MANUAL
TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2021-10

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO
 SATUAN KERJA : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 20-05-2022
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
01-10-2021	004/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Balik atas Manual Saldo Tukin Nomor 003/WPB.29/BG.010 2/2021 pada 30 September 2021	648741.050.111821.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	111821	AKRUAL	623,425,239	0	Sudah
01-10-2021	004/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Balik atas Manual Saldo Tukin Nomor 003/WPB.29/BG.010 2/2021 pada 30 September 2021	648741.050.212191.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	212191	AKRUAL	0	623,425,239	Sudah
						623,425,239	623,425,239	

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2021-12

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO
 SATUAN KERJA : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 20-05-2022
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2021	003/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Penyesuaian Koreksi Nilai Aset	648741.050.391116.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	391116	AKRUAL	0	85,425,000	Sudah
31-12-2021	003/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Penyesuaian Koreksi Nilai Aset	648741.050.491429.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	491429	AKRUAL	85,425,000	0	Sudah
						85,425,000	85,425,000	

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2021-12

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH/PROPINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO
SATUAN KERJA : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 20-05-2022
Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2021	006/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Penyesuaian Tagihan Air Desember 2021	648741.050.212112.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	212112	AKRUAL	0	2,076,000	Sudah
31-12-2021	006/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Penyesuaian Tagihan Air Desember 2021	648741.050.522113.0150800.0000000. 0000000000.000000.2.3151.2.000000.0 00000	522113	AKRUAL	2,076,000	0	Sudah
						2,076,000	2,076,000	

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2021-13

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
 WILAYAH/PROPINSI : 2600 KANWIL DJPB PROVINSI GORONTALO
 SATUAN KERJA : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 20-05-2022
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.522112.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	522112	AKRUAL	0	3,649,515	Sudah
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.391119.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	391119	AKRUAL	3,649,515	0	Sudah
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.212112.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	212112	AKRUAL	0	3,592,432	Sudah
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.522112.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	522112	AKRUAL	3,592,432	0	Sudah
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.522111.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	522111	AKRUAL	0	15,392,848	Sudah
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.391119.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	391119	AKRUAL	15,392,848	0	Sudah
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.212112.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	212112	AKRUAL	0	18,081,752	Sudah
31-12-2021	010/WPB.29/B G.0102/2021	Jurnal Koreksi Audited Untuk Mengakui Tagihan Telepon Bulan Desember 2020	648741.050.522111.0150800.0000000. 0000000000.00000.2.3151.2.000000.0 00000	522111	AKRUAL	18,081,752	0	Sudah
						40,716,547	40,716,547	

FORMULIR MEMO JURNAL KOREKSI AKUN LISTRIK DAN TELEPON

Kementerian : Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga :
Eselon I : (01508) Ditjen Perbendaharaan
Wilayah : (026) Provinsi Gorontalo
Satuan Kerja : (648741)KANWIL GORONTALO
No Dokumen : 010/WPB.29/BG.0102/2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Tahun Anggaran : Tahun 2021
Keterangan : Jurnal Koreksi Desember 2021

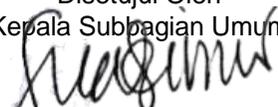
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	3.649.515	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		3.649.515
2	D	522112	Belanja Langganan Telepon	3.592.432	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		3.592.432
3	D	391119	Koreksi Lainnya	15.392.848	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		15.392.848
4	D	522111	Belanja Langganan Listrik	18.081.752	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		18.081.752

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran



Faida Dwi Aryani

Disetujui Oleh
Kepala Subbagian Umum



Muhammad Wifqi Fuadi

Direkam Oleh :
Operator GLP SAKTI



Faida Dwi Aryani

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	
Eselon I	:	(01508) Ditjen Perbendaharaan
Wilayah	:	(026) Provinsi Gorontalo
Satuan Kerja	:	(497622) KPPN Marisa
No Dokumen	:	SP DIPA-015.08.2.497622/2021
Tanggal	:	16 November 2020
Tahun Anggaran	:	Tahun 2021
Keterangan	:	Jurnal Manual Desember 2021

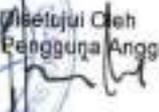
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Rp 307.250
2	D	522113	Beban Langganan Air	Rp 307.250	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

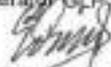

Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001



Dibekukukan Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran


Choirul Anam
NIP 197011171990121001

Direkam Oleh :
Operator GLR SAKTI

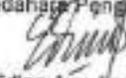

Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : (01508) Ditjen Perbendaharaan
 Wilayah : (026) Provinsi Gorontalo
 Satuan Kerja : (497622) KPPN Marisa
 No Dokumen : SP DIPA-015.08.2.497622/2021
 Tanggal : 16 November 2020
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Manual Desember 2021

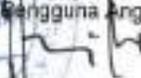
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	522111	Beban Langganan Listrik	Rp. -	Rp. 9.705.891
2	D	391119	Koreksi Lainnya	Rp. 9.705.891	Rp. -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran


 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001



Dibetujui Oleh
Koasa Pengguna Anggaran


 Choirul Anam
 NIP 197011171990121001

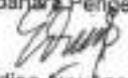
Dirakam Oleh :
Operator GLP SAKTI


 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	(01508) Ditjen Perbendaharaan
Eselon I	:	(026) Provinsi Gorontalo
Wilayah	:	(497622) KPPN Marisa
Satuan Kerja	:	SP DIPA-015.08.2.497622/2021
No Dokumen	:	16 November 2020
Tanggal	:	Tahun 2021
Tahun Anggaran	:	Jurnal Manual Desember 2021
Keterangan	:	

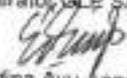
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	522112	Beban Langganan Telepon	Rp -	Rp 2.461.298
2	D	391119	Koreksi Lainnya	Rp 2.461.298	Rp -

Dibuat Oleh :
 Bendahara Pengeluaran

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001



Dipertujui Oleh
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Cipriul Anam
 NIP 197011171990121001

Direkam Oleh :
 Operator GLB SAKTI

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	(01508) Ditjen Perbendaharaan
Eselon I	:	(026) Provinsi Gorontalo
Wilayah	:	(497622) KPPN Marisa
Satuan Kerja	:	SP DIPA-015.08.2.497622/2021
No Dokumen	:	15 November 2020
Tanggal	:	Tahun 2021
Tahun Anggaran	:	Jurnal Manual Desember 2021
Keterangan	:	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	522113	Beban Langganan Air	Rp -	Rp 355.000
2	D	391119	Koreksi Lainnya	Rp 355.000	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

Edina Ayu Angesti
Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001



Disetujui Oleh
Kepala Pengguna Anggaran

Cadurul Anam
Cadurul Anam
NIP 197011171990121001

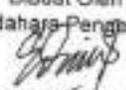
Direkam Oleh :
Operator GLP SAKTI

Edina Ayu Angesti
Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001

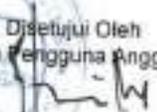
FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

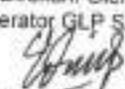
Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	(01508) Ditjen Perbendaharaan
Eselon I	:	(026) Provinsi Gorontalo
Wilayah	:	(497622) KPPN Marisa
Satuan Kerja	:	SP DIPA-015.08.2.497622/2021
No Dokumen	:	16 November 2020
Tanggal	:	Tahun 2021
Tahun Anggaran	:	Jurnal Manual Desember 2021
Keterangan	:	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Rp 2.448.820
2	D	522112	Beban Langganan Telepon	Rp 2.448.820	Rp -

Dibuat Oleh :
 Bendahara Pengeluaran

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001



Dijetui Oleh
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Chibirul Anam
 NIP 197011171990121001

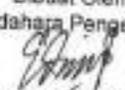
Direkam Oleh :
 Operator GLP SAKTI

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001

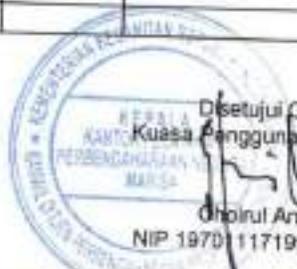
FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : (01508) Ditjen Perbendaharaan
 Wilayah : (026) Provinsi Gorontalo
 Satuan Kerja : (497622) KPPN Marisa
 No Dokumen : SP DIPA-015.08.2.497622/2021
 Tanggal : 16 November 2020
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jumlah Manual Desember 2021

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Rp 9.209.850
2	D	522111	Beban Langganan Listrik	Rp 9.209.850	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

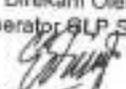

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001



Disetujui Oleh :
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Choirul Anam
 NIP 197011171990121001

Direkam Oleh :
 Operator BLP SAKTI

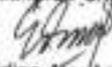

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	(01508) Ditjen Perbendaharaan
Eselon I	:	(026) Provinsi Gorontalo
Wilayah	:	(497622) KPPN Marisa
Satuan Kerja	:	SP DIPA-015.08.2.497622/2021
No Dokumen	:	16 November 2020
Tanggal	:	Tahun 2021
Tahun Anggaran	:	Jurnal Manual Desember 2021
Keterangan	:	

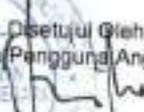
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp 153.415.561
2	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 153.415.561	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

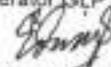

Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001



Dsetujui Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran


Choirul Anam
NIP 197011171990121001

Direkam Oleh :
Operator GLP SAKTI


Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	
Eselon I	:	(01508) Ditjen Perbendaharaan
Wilayah	:	(028) Provinsi Gorontalo
Satuan Kerja	:	(497622) KPPN Marisa
No Dokumen	:	SP DIPA-015.08.2.497622/2021
Tanggal	:	18 November 2020
Tahun Anggaran	:	Tahun 2021
Keterangan	:	Jurnal Manual Desember 2021

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp -	Rp 153.415.561
2	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 153.415.561	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

Edina Ayu Angesti
Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001



Ditetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran

Chdirul Anant
Chdirul Anant
NIP 197010171990121001

Direkam Oleh :
Operator GLP SAKTI

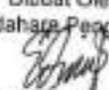
Edina Ayu Angesti
Edina Ayu Angesti
NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : (D1508) Ditjen Perbendaharaan
 Wilayah : (026) Provinsi Gorontalo
 Satuan Kerja : (497622) KPPN Marisa
 No Dokumen : SP DIPA-015.08.2.497622/2021
 Tanggal : 16 November 2020
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Manual Desember 2021

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp 176.748.375
2	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 176.748.375	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

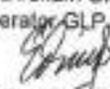

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001



Dibetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


 Giorul Anam
 NIP 197011171990121001

Direkam Oleh :
Operator GLP,SAKTI

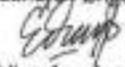

 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : (01508) Ditjen Perbendaharaan
 Wilayah : (026) Provinsi Gorontalo
 Satuan Kerja : (497622) KPPN Marisa
 No Dokumen : SP DIPA-015.08.2.497622/2021
 Tanggal : 16 November 2020
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Jurnal Manual Desember 2021

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp -	Rp 176.748.375
2	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 176.748.375	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran


 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001



Disetujui Oleh :
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Choirul Anam
 NIP 197011171990121001 4

Direkam Oleh :
 Operator GLP SAKTI


 Edina Ayu Angesti
 NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian
Negara/Lembaga
Eselon I
Wilayah
Satuan Kerja
No Dokumen
Tanggal
Tahun Anggaran
Keterangan

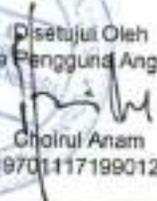
Kementerian Keuangan
(01508) Ditjen Perbendaharaan
(026) Provinsi Gorontalo
(497622) KPPN Marisa
SP DiPA-015.08.2.497622/2021
16 November 2020
Tahun 2021
Jurnal Manual Desember 2021

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	K	593149	Beban Persediaan Lainnya	Rp -	Rp 2.211.000
2	D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 2.211.000	Rp -

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran


Edina Ayu/Angesti
NIP 199903212021012001

Disetujui Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran


Cholul Anam
NIP 197011171990121001

Direkam Oleh :
Operator GLP-SAKTI


Edina Ayu/Angesti
NIP 199903212021012001

FORMULIR MEMO JURNAL BALIK ATAS KOREKSI SPM

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga : (01508) Ditjen Perbendaharaan
 Eselon I : (026) Provinsi Gorontalo
 Wilayah : (526281) KPPN Gorontalo
 Satuan Kerja : SP-015.08.2.526281/2021
 No Dokumen : 23 November 2020
 Tanggal : Tahun 2021
 Tahun Anggaran :
 Keterangan : Jurnal Balik Desember 2021

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.101.000	
	D	521111	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran	420.000	
	K	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		14.521.000

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

Zulius Suratinoyo
NIP 19861122008021002



Disetujui Oleh :
Kepala Subbagian Umum

Rahmat Kurniawan
NIP 197305031994021001

Direkam Oleh :
Operator GLP SAKTI

Zulius Suratinoyo
NIP 19861122008021002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian
Negara/Lembaga
Eselon I
Wilayah
Satuan Kerja
No Dokumen
Tanggal
Tahun Anggaran
Keterangan

Kementerian Keuangan
(01508) Ditjen Perbendaharaan
(026) Kanwil Prov Gorontalo
(528281) KPPN Gorontalo
SP-015.08.2.528281/2021
23 November 2020
Tahun 2021
Jurnal Penyesuaian 31 Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima di Muka <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar di Muka <input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran <input type="checkbox"/> Persediaan	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Transfer Masuk <input type="checkbox"/> Transfer Keluar <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca <input type="checkbox"/> Koreksi <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja
--	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Langganan Air	518.315	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		518.315

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

Zulius Sumtinoyo
NIP 19861122006021002



Ditetujui Oleh
Kepala Subbagian Umum

Bahriat Kamirwan
NIP 197309031994021001

Direkam Oleh :
Operator GLP SAKTI

Zulius Sumtinoyo
NIP 19861122006021002

FORMULIR MEMO JURNAL KOREKSI AKUN LISTRIK DAN TELEPON

Kementerian	:	Kementerian Keuangan
Negara/Lembaga	:	(D1508) Ditjen Perbendaharaan
Eselon I	:	(026) Provinsi Gorontalo
Wilayah	:	(526281) KPPN Gorontalo
Satuan Kerja	:	SP-015.08.2.528281/2021
No Dokumen	:	23 November 2020
Tanggal	:	Tahun 2021
Tahun Anggaran	:	Jurnal Koreksi Desember 2021
Keterangan	:	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	1.024.210	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		1.024.210
2	D	522112	Belanja Langganan Telepon	1.024.210	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		1.024.210
3	D	391119	Koreksi Lainnya	17.657.119	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		17.657.119
4	D	522111	Belanja Langganan Listrik	16.025.831	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		16.025.831

Dibuat Oleh :
Bendahara Pengeluaran

Zulius Suratnoyo
NIP 198611122006021002



Disetujui Oleh
Kepala Subbagian Umum

Ratna Kurniawan
NIP 197309081994021001

Direkam Oleh :
Operator GUP SAKTI

Zulius Suratnoyo
NIP 198611122006021002

TELAAH

Laporan

Keuangan

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT WILAYAH
PERIODE TAHUN 2021**

Kode BA dan Nama BA : (025) Kementerian Keuangan
Kode Es1 dan Nama Es1: (08) Ditjen Perbendaharaan
Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (026) Kamwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)		
1. Pernyataan Tanggung Jawab	v	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	v	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	v	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		
1. Neraca Percobaan Akrual	v	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan Tahun 2020?	v	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance		
1. Adakah Saker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"	v	Tidak
Saldo antar Laporan		
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	v	Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v	Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terakumulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA		
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)	v	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	v	Tidak
TELAHAH PERAKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxx)		
1. Adakah akun Aset (1xxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansas di LIFI, atau Piutang BLU Jaminan Kesehatan di Kementerian Dikti.	v	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainya adalah akun BUN)	v	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		
1. Akun 114113/4/5/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	v	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	v	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			v	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			v	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Penghasilan Hibah Langsung TAYL pada Tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan 2021)		N/A	N/A	Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	N/A	Tidak
Sehubungan terbitnya Surat 5-876/PB/2020 Itg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.				
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya s akun 218211 ?		N/A	N/A	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			v	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. DI RRI, TVRI dan POLRI			v	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			v	Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			v	Ada/Tidak
5. Jika ada, apakah saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomtabel atau sebaliknya		N/A	N/A	Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Penghasilan Hibah Langsung > akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		N/A	N/A	Ya
Saldo akun 391152 hanya berasal dari selisih akumulasi penyesuaian aset yang dilakukan rekas keluar dan rekas masuk. Mar akan yang direklas keluar dan direklas masuk semertinya sama. Selisih transaksi rekas keluar dan rekas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekas				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK				0
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TK/TM secara absolut tsb ?				
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan				-192.927.103
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan sesuai BA 015.04 ?			v	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx			v	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			v	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			v	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			v	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		v	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Keajaiban terdapat pada Kementerian Kesehatan		v	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		v	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		v	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		v	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A	N/A	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		v	Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		v	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekan? (cek pada Aplikasi e-Rekan pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		v	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		v	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		v	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			0
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			0
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	NORMAL		Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		v	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklas)Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan Januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekan kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	v		Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	v		Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		v	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		v	Tidak
3. Adakah beban bunga		v	Tidak
4. Adakah beban subsidi		v	Tidak
5. Adakah beban hibah		v	Tidak
6. Adakah beban transfer		v	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		v	Tidak
Pengecekan saldo Normal			
	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uralannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		v	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	v		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015			
	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	v		Ya
Jika hasil diatas "Tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		v	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Sama
Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111			
Pengecekan akun koreksi			
	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	v		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp200.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
2. Apakah ada Penjumlahan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		v	Tidak
Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "All" atau "JRNADU" dan "JRNLMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)			
Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		v	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding 2020, Apakah demikian?	v		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	v		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		v	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	v		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		v	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		v	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		v	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 525xxx pada neraca percobaan kas ?	N/A	N/A	Ya
7. Adakah beban bansos?		v	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxx pada neraca percobaan kas ?	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Akruai	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		v	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		v	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?		v	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		v	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	v		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		v	Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKXL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		v	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?		v	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN" > Rekap Rekon internal dan Rekap Rekon internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar ss Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		v	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	N/A	N/A	Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon			
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi, Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	Ada	Tidak	Seharusnya
		v	
MENU DAFTAR BMN			
1. Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Seharusnya	Ya	Tidak
2. Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	Tidak		v
3. Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		0	
4. Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		0	
5. Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	Tidak		
6. Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		0	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-ik menu daftar >> pagu minus?)		v	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		v	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo?		v	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		v	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		v	Tidak
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal 2020 telah diselesaikan (Dinhilkan) ?	v		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	v		
Cek keberman apabila ada Jurnal baru di 2021			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	v		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	v		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		v	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	v		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		v	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	v		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	v		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKI (Neraca Percobaan)	v		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)			
	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	v		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	v		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	v		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?		v	Ada
Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "swaitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPI Bendahara dan Rekening Koran.			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?		v	Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	v		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	v		Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	v		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	v		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	v		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan beban persediaan terlampir)	v		Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA			
	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Relokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19	v		
2. Jika terdapat Refocussing kegiatan/Relokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L.			Rp82.989.000
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		v	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		v	
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		v	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	v		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional			
	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		v	
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		v	
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	v		

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		V
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		V
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		V
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		V
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		V
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		V
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		V
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		V

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excec) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"



Mengetahui
Kepala Subbagian Keuangan,
Mulyono
NIP 197607191999031002

Mei 2022
Penelaah
Fid
Faida Dwi Aryani
NIP 19960414201902005



KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 3, Kota Gorontalo - 96128

Telp : 0435-826694

Faksimili : 0435-824412

email : kanwil26gorontalo@gmail.com

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/gorontalo/id/